IMPLEMENTASI SISTEM ZONASI DALAM PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN STUDI KASUS DI SMA NEGERI 5 SURABAYA

SKRIPSI

Oleh:

Firda Rizqy Amalia
D93216046

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

PROGRAM STRUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

JURUSAN PENDIDIKAN ISLAM

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : FIRDA RIZQY AMALIA

NIM : D93216046

JUDUL : IMPLEMENTASI SISTEM ZONASI DALAM PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN STUDI KASUS DI SMA NEGERI 5 SURABAYA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Surabaya, 18 Februari 2020

Pembuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL

E2A2BAHF367527256

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Firda Rizqy Amalia

D93216046

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh:

NAMA : FIRDA RIZQY AMALIA

NIM : D93216046

JUDUL : IMPLEMENTASI SISTEM ZONASI DALAM PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN STUDI KASUS DI SMA NEGERI 5 SURABAYA

TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI UNTUK DIUJIKAN

Surabaya, 25 Februari 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H Imam Bawani, MA	Dr. Arif Masyuri M.Pd
NIP. 195208121980031006	NIP. 197903302014111001

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertanggung jawabkan di depan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Surabaya, 12 Maret 2020
Mengesahkan,
Dekan

Prof. Dr. H. Ali Mas'ud M.Ag M.Pd.I
NIP. 196301231993031002

Penguji I

Dr.Samsul Ma'arif M.Pd
NIP. 196404071998031003

penguji II

Ali Musthofa M.Pd
NIP. 197612252005011008

Penguji III

Prof. Dr. H Imam Bawani, MA
NIP. 195208121980031006

Penguji IV

Dr. Arif Masyuri M.Pd
NIP. 197903302014111001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FIRDA RIZQY AMALIA
NIM : D93216046
Fakultas/Jurusan : TARBIYAH DAN KEGURUAN/ PENDIDIKAN ISLAM
E-mail address : firdarizqyamalia18@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
IMPLEMENTASI SISTEM ZONASI DALAM PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN

STUDI KASUS DI SMA NEGERI 5 SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Juni 2020

Penulis

Firda Rizqy Amalia

ABSTRAK

FIRDA RIZQY AMALIA (D93216046) 2020: Implementasi Sistem Zonasi dalam Pemerataan Layanan Pendidikan Studi Kasus di SMA Negeri 5 Surabaya. Dosen pembimbing I Dr.H Imam Bawani MA dosen pembimbing II Dr. Arif Masyuri, M.Pd.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan regulasi sistem zonasi yang di terapkan SMA Negeri 5 Surabaya, implementasi sistem zonasi dalam pemerataan layanan pendidikan, dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dari implementasi sistem zonasi dalam pemerataan layanan pendidikan di SMA Negeri 5 Surabaya. Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode mengumpulkan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian utama dilakukan di SMA Negeri 5 Surabaya. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) regulasi sistem zonasi berdasarkan keputusan menteri pendidikan dan kemudayaan dalam Permendikbud no 17 tahun 2017 yang kemudian diamandemen dalam Permendikbud 14 tahun 2018, selanjutnya mengalami perubahan yang diatur kembali pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 51 taun 2018. Juknis yang digunakan berdasarkan Peraturan daerah Gubernur Jawa Timur no 23 Tahun 2019. (2) Pemerataan layanan pendidikan yang dilakukan SMA Negeri 5 Surabaya dalam memberikan akses saat pelayanan PPDB hingga pengelolaan layanan kepada siswa yang telah diterima. (3) Proses implementasi sistem zonasi dalam pemerataan layanan pendidikan di SMA Negeri 5 Surabaya berjalan dalam bentuk kesempatan untuk mengakses kebutuhan calon peserta didik dalam pendaftaran dan pasca penerimaan siswa baru dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk layanan bimbingan, informasi dan sarana prasarana yang dibutuhkan. (4) faktor pendukung pemerataan layanan pendidikan pada sistem zonasi adalah adanya faktor hukum melalui kebijakan yang telah ditetapkan. faktor kinerja dan loyalitas staff dan guru. Adanya sarana prasana untuk mencapai tujuan. Faktor penghambat adalah waktu yang terlalu singkat dalam proses sosialisasi dari pemerintah. Masyarakat masih ingin anaknya bersekolah di SMA Negeri dengan melalui jalur nilai danem UN.

Kata kunci: sistem zonasi, implementasi, pemerataan, layanan pendidikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI iii
LEMBAR PUBLIKASI iv
ABSTRAK v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
E. Definisi Konseptual 7
F. Penelitian Terdahulu 10
G. Sistematika Pembahasan 16
BAB II 18
KAJIAN TEORI 18
A. Pemerataan layanan Pendidikan 18
1. Pengertian pemerataan 18
2. Pendekatan Pemerataan 21
3. Pengertian layanan pendidikan 22
4. Bentuk Layanan Pendidikan 23
B. Implementasi Sistem zonasi 24
1. Pengertian implementasi 25
2. Pengertian Kebijakan 29
3. Langkah-langkah implementasi kebijakan pendidikan 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pengertian Sistem Zonasi 34
BAB III 37
METODE PENELITIAN 37
A. Jenis Penelitian 37
B. Lokasi Penelitian 37
C. Sumber Data 38
D. Metode Pengumpulan Data 41
E. Analisis Data 46
F. Keabsahan Data 49
BAB IV 55
PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN 55
A. Gambaran Umum SMA Negeri 5 Surabaya 55
1. Diskripsi lokasi 55
2. Jalur Pendaftaran Calon Siswa Baru 58
B. Penyajian Data inti 60
1. Regulasi Sistem Zonasi di SMA Negeri 5 Surabaya 64
2. Pemeratan Layanan pendidikan di SMA Negeri 5 Surabaya. 72
3. Implementasi sistem zonasi dalam pemerataan layanan pendidikan di SMA Negeri 5 Surabaya 76
4. Faktor Pendukung dan Penghambat Sistem Zonasi dalam Pemerataan Layanan Pendidikan di SMA Negeri 5 Surabaya 80
C. Pembahasan 86
1. Regulasi sistem zonasi di SMA Negeri 5 Surabaya. 87
2. Pemeratan Layanan pendidikan di SMA Negeri 5 Surabaya 92
3. Implementasi Sistem Zonasi dalam Pemerataan Layanan Pendidikan di SMA Negeri 5 Surabaya 93
4. Faktor Pendukung dan Penghambat Sistem Zonasi dalam Pemerataan Layanan Pendidikan di SMA Negeri 5 Surabaya 95
BAB V 99
PENUTUP 99
A. Kesimpulan 99
B. Saran 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA 102
LAMPIRAN 105
WAWANCARA 116
OBSERVASI 164
DOKUMENTASI 167
DOKUMENTASI SURAT PERIZINAN 182

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Langkah-Langkah Implementasi Kebijakan Pendidikan 33

Tabel 3. 1 Tabel Kode Pengumpulan Data 40

Tabel 3. 2 Tabel Informan Wawancara..... 40

Tabel 4. 1 Berikut jadwal pelaksanaan sistem zonasi pada PPDB 2019 58

Tabel 4. 2 Pendaftar di SMA Negeri 5 Surabaya tahun 2019..... 60

Tabel 4. 3 Daftar Kecamatan Berdasarkan Akses Zona 61

Tabel 4. 4 Alamat Sekolah Menengah Atas Negeri di Surabaya..... 61

Tabel 4. 5. Presentasi Kuota Penerimaan Siswa Baru SMA Negeri Tahun 2019. 65

Tabel 4. 6 Siswa yang diterima SMA Negeri 5 Surabaya..... 67

Tabel 4. 7 jarak rumah siswa yang diterima SMA Negeri 5 Surabaya pada PPDB 2019..... 77

Tabel 4. 8 Tabel penerimaan siswa baru tahun 2019 brdasarkan jenis kelamin... 77

Tabel 4. 9 Rata-rata nilai Ujian Nasional siswa yang diterima pada PPDB tahun 2019..... 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Foto KBM dengan cara belajar kelompok 75

Gambar 4. 2 Foto kegiatan guru menerangkan materi pada salah sau kelompok. 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pemilihan Subjek Partisipan 106
Lampiran 2 Pemilihan Bahan Penelitian 107
Lampiran 3 Daftar Kode Topik Pengumpulan Data 112
Lampiran 4 OUTLINE PENGGALIAN DATA: melalui dokementasi 113
Lampiran 5 Transkrip Wawancara dengan Perwakilan Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur 116
Lampiran 6 Transkrip Wawancara dengan Perwakilan Dewan Pendidikan 118
Lampiran 7 Transkrip Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah bidang Humas 126
Lampiran 8 Transkrip Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan 133
Lampiran 9 Transkrip Wawancara dengan Pengembang SKS 136
Lampiran 10 Transkrip Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran 143
Lampiran 11 Transkrip Wawancara dengan Siswa 146
Lampiran 12 Catatan lapangan di SMA Negeri 5 Surabaya kegiatan layanan pendidikan 165
Lampiran 13 Dokumentasi PPDB SMA Negeri 5 Surabaya tahun 2019 167
Lampiran 14 Dokumentasi Siswa yang diterima SMA Negeri 5 Surabaya 167
Lampiran 15 Dokumentasi jarak rumah siswa yang diterima SMA Negeri 5 melalui jalur zonasi 168
Lampiran 16 Dokumentasi potensi nilai UNAS siswa yang diterima pada tahun 2019 168
Lampiran 17 jenis kelamin siswa baru tahun penerimaan 2019 168
Lampiran 18 Proyeksi penduduk kota surabaya berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia tahun 2020 169
Lampiran 19 Daftar Sekolah Menengah Atas Negeri Wilayah Surabaya 169
Lampiran 20 Daftar Kecamatan Berdasarkan Akses Zona SMA Negeri 171
Lampiran 21 Presentase kuota penerimaan siswa baru SMA Negeri tahun 2019 171

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lampiran 22 Jadwal pelaksanaan PPDB SMA/SMK Negeri tahun 2019 172
Lampiran 23 Jumlah pendidik dan tenaga pendidik SMA Negeri 5 Surabaya Tahun 2020 173
Lampiran 24 Dokumentasi Daftar Pendidik dan Tenaga Pendidik 173
Lampiran 25 Dokumentasi sejarah SMA Negeri 5 Surabaya 175
Lampiran 26 Visi, Misi, dan Tujuan SMA Negeri 5 Surabaya 175
Lampiran 27 Absen Siswa Dengan Data Kecepatan Belajar 177
Lampiran 28 Dokumentasi lapoan PPDB SMA Negeri 5 Surabaya 178
Lampiran 29 Foto ketika Penelitian 179
Lampiran 30 Surat Dari Fakultas 182
Lampiran 31 Surat Dari Bankesbangpol 183
Lampiran 32 Surat Disposisi Dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo 184
Lampiran 33 Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian 185

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Reformasi pendidikan telah dilakukan dan regulasi atas perubahan kebijakan pembangunan pendidikan nasional telah dimulai.[1] Reformasi dilakukan berdasarkan UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan."[2] Setiap orang khususnya dalam masa mudanya memerlukan pendidikan dan pengajaran. Dalam konteks kesetaraan dan keadilan bidang pendidikan, maka seluruh masyarakat, baik laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada setiap satuan, jenjang dan jenis pendidikan. Dengan kesadaran pentingnya pendidikan, maka pemerintah mewajibkan warganya untuk mengenyam pendidikan.

Regulasi yang memuat tentang peraturan pendidikan berdasar pada Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alenia ke empat, yang berbunyi "untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa." Yang kemudian dijabarkan dalam UUD 1945 bab XIII pasal 31 ayat 1. Pendidikan yang menyeluruh ini diatur kembali dalam UU no 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 1 ". Dalam rangkaian regulasi ini bahwa Pemerintah memberikan regulasi yang kuat terhadap pendidikan yang berasas pemerataan pada layanan pendidikan. Sistem zonasi adalah sistem yang mengatur penerimaan peserta

[1] Yoyon Bahtiar Irianto. "*Kebijakan Pembaruan Pendidikan*". Jakarta: Rajawali Pers. 2012. Hlm 11.
[2] UUD 1945 BAB 13 tentang pendidikan pasal 31 ayat 1. Hlm. 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didik baru. Kebijakan ini dibuat pada tahun 2017 dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 17 tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru dari jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan kejuruan. Pemberlakuan sistem ini dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing. Pada tahun selanjutnya diamandemen pada Peraturan Menteri no 14 tahun 2018, kemudian diamandemen pada Peraturan Menteri no 51 tahun 2018 dan mengalami perubahan kembali yang dimuat pada Peraturan Menteri no 20 tahun 2019. Perbedaan siknifikan terlihat pada besar presentase kuota yang digunakan dalam pelaksanaan sistem zonasi.

Kebijakan penerimaan siswa baru tahun 2017 dan 2018 satuan pendidikan wajib menerima calon peserta didik melalui jalur zonasi sebesar 90% dari julmah kuota yang dimilik. 5% digunakan pada jalur prestasi dan 5% digunakan pada jalur alasan khusus (pindah domisili orang tua misalnya)[3].

Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu. Penerimaan diranking dari total jumlah peserta didik yang akan diterima.*whether the PPDB policy based on the zoning system can improve education equity.*[4] Sedangkan pada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 20 tahun 2019 memuat presentase penerimaan jalur zonasi sebesar 80%, paling banyak menerima siswa jalur prestasi sebesar 15%, dan penerimaan siswa jalur khusus sebesar 5%.

---

[3] Novrian Satria Perdana. Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*. P.ISSN: 2579-5082. Vol 3. 2019. Hlm 83.

[4] Cecep Wahyu Hoerudin. "Evaluation Of New Student Admission Policy Based On Zonation System In Bandung City*" JISPO* VOL. 9 No. 2 Edisi: Juli-Desember Tahun 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indeks pembanguan sumber daya manusia di Surabaya sebanyak 124.064 siswa dengan 44.643 murid SMP Negeri dan 69.303 siswa SMP swasta pada tahun 2012. Dari data ini kota Surabaya setidaknya harus menyediakan layanan pendidikan yang memadai dalam mengelola kelulusan dan penerimaan siswa baru. Sementara untuk SMA, di Surabaya terdapat 22 SMA Negeri dan 146 SMA swasta dengan jumlah murid negeri sebanyak 20.137 siswa dan swasta sebanyak 32.727 siswa.[5] Dengan data penerimaan dan kelulusan siswa yang memiliki statistik yang dinamis maka Peraturan pemerataan siswa ini mulai tahun 2017 hingga 2019 menggunakan sistem zonasi.

Salah satu guna zonasi adalah menghilangkan predikat sekolah negeri favorit yang mana akan persebaran pendaftaran siswa bertumpu pada beberapa sekolah saja. SMA negeri di Surabaya yang memiliki predikat favorit yakni SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 6, SMA Negeri 5 Surabaya sebelum penghapusan sekolah kawasan di Surabaya, dengan jumlah pendaftar pada pilihan pertama.

Perumusan kebijakan ini diwujudkan dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia nomor 51 tahun 2018 tentang penerimanaan peserta didik baru pada aman kanak-kanak sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Dalam sistem ini mengatur jalur

[5] Informasi Data Pokok Kota Surabaya Tahun 2012. www.perpustakaan.bappenas.go.id diakses pada 05:10. 11 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerimaan siswa yakni zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua atau wali.

Momentum pelaksanaan wajib belajar yang sudah diprogramkan pemerintah sejak pelita I pada hakikatnya bertujuan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan YME, kecerdasan dan keterampilan mempertinggi budi pekerti.[6] Dalam UU No. 20 tahun 2003 menjelaskan bahwa peserta didik dapat diartikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.[7] Peserta didik adalah seorang indvidu yang memiliki cita-cita yang disalurkan melalui pendidikan lanjutan yang adil.

Menurut Taliziduhu Ndraha pemerintah adalah Organisasi yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan dengan masyarakat. Dalam hubungan itu sah dalam wilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu dan pemerintah wajib melayaninya.[8]

SMA Negeri 5 Surabaya memiliki jumlah peminat 475 pemilih di tahun 2018, dan 427 diantaranya pemilih pertama, dengan nilai minimum 35,90 dan nilai maksimal paling tinggi 38, 40.[9] Sekolah ini menduduki peringkat pertama berdasarkan nilai rata-rata lulusan tahun 2019 dengan total rata-rata 86,65.[10]

---

[6] Ary H. Gunawan. "*Kebijakan-kebijakan Pendidikan.*" Jakarta: Rineka Cipta. 1995. Hlm. 87.
[7] Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 4 ayat 1. Diakses pada 8 Oktober 2019. www.google/uuno. 20 tahun 2003.com.
[8] Jimly Asshiddique ..Konstitusi dan Konstitusionalisme. Jakarta: Sinar Grafika. 2012. Hlm. 36.
[9] PPDB Jawa Timur 2018. www.ppdbjatim.net. diakses pada 28 Desember 2019 at 12:30
[10] http://Liputan 6.com yang dikutip dari web PPDB Jawa Timur (www.ppdbjatim.net) diakses pada 20 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekolah ini termasuk dalam sekolah percontohan yang mana menjadi favorit dikalangan calon peserta didik dan wali murid untuk menuntut ilmu di sini.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelititan dengan judul ”Implementasi Sistem Zonasi dalam Pemerataan Layanan Pendidikan studi kasus di SMA Negeri 5 Surabaya.”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penelitian ini terfokus pada implementasi sistem zonasi dan pemerataan akses layanan pendidikan yang diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi sistem zonasi di SMA Negeri 5 Surabaya?
2. Bagaimana implementasi pemerataan layanan pendidikan di SMA Negeri 5 Surabaya?
3. Bagaimana implementasi sistem zonasi dalam pemerataan layanan pendidikan di SMA Negeri 5 Surabaya?
4. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi sistem zonasi dalam pemerataan layanan pendidikan di SMA Negeri 5 Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan regulasi sistem zonasi di SMA Negeri 5 Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengetahui dan mendeskripsikan implementasi pemerataan layanan pendidikan di SMA Negeri 5 Surabaya.
3. Mengetahui dan mendeskripsikan implementasi sistem zonasi dalam pemerataan layanan pendidikan di SMA Negeri 5 Surabaya.
4. Mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat implementasi sistem zonasi dalam pemerataan layanan pendidikan di SMA Negeri 5 Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat secara subjektif, sebagai sarana melatih dan mengembangkan kemampuan dalam berfikir kritis, sistematis, dan kemampuan dalam menulis. Selain itu pula melatih menulis karya ilmiah berdasarkan kajian teori dan aplikasi yang diperoleh dari program studi manajemen pendidikan islam, fakultas Tarbiyah dan keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
2. Manfaat secara akademisi, diharapkan penelitian ini dapat memeberikan manfaat bagi pihak akademisi atau pihak-pihak yang berkompeten. Baik dari pencarian informasi atau sebagai refrensi mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi dalam pemerataan akses layanan pendidikan di SMA Negeri 5 Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Manfaat secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan kebijakan sistem zonasi dalam pemerataan akses layanan pendidikan di SMA Negeri 5 Surabaya.

E. Definisi Konseptual

1. Implementasi

Kata implementasi merupakan kata serapan dari bahasa asing, yakni bahasa Inggris, yang mana bentuk kata awalnya adalah *Implementation* yang bentuk kata kerjanya adalah *to implement* dimaksudkan sebagai (1) to carry into effect. Membawa suatu hasil atau (akibat).[11] Impelementasi merupakan sautu aktivitas yang yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.[12]

2. Kebijakan

Keberadaan kebijakan pada lembaga atau instansi menjadi suatu keharusan, bahkan bersifat wajib bila dihukumkan.[13] Dalam penerapannya Negara mempunyai andil besar dalam menentukan kebijakan yang akan diterapkan untuk kedepannya. dalam pendidikan kebijakan diputuskan berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alenia ke empat yang berbunyi "dalam mencerdaskan kehidupan bangsa" yang mana perumusannya dijabarkan pada UUD 1945 bab XIII pasal 31 no 1 "setiap

[11]Rahayu Kusuma Dewi. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: Pustka Setia Hlm. 153.
[12] TachJan. Implementasi kebijakan Publik. Bandung: AIPI. 2006. Hlm 24.
[13] Rahayu kusuma Dewi. Studi Analisis Kebijakan. Bandung: Pustka Setia. Hlm 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warga negara berhak untuk mengenyam pendidikan.“ dengan aspek aspek lebih terperinci.

Istilah kebijakan dipergunakan secara luas, istilah ini berkaitan dengan kebijakan ekonomi, kebijakan publik dan lain sebagainya. Kata kebijakan dalam bahasa ingris ialah *policy* digunakan untuk menunjukan perilaku aktor(misalnya pejabat, kelompok, atau lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

3. Pemerataan Layanan Pendidikan

Pemerataan dan perluasan pendidikan merupakan suatu kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah. Baik diataur pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pendidikan di negara ini sebenarnya telah menjadi salah satu perhatian kusus untuk dilihat bagaimana akses pemerataan bisa dinikmati oleh semua warga di seluruh Indonesia[14].

Pemerataan pendidikan adalah sebuah pemerataan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan bagi semua kalangan.[15] Pemerataan ada dua aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yaitu akses pendidikan bisa dinikmati oleh semua penduduk yang berusia sekolah. Kedua, keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat yaitu pendidikan bisa di akses oleh antar suku, agama dan kelompok secara sama.[16] Dalam

[14] UUD 1945 pasal 28 C ayat (1), pasal 31 ayat (2), pasal 31 ayat (3) dan (4)
[15] Thomas Joni Verawanto Aristo, Analisis Permasalahan Pemerataan Pendidikan di Kabupaten Sintang. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan. Vol 7 No 1 April 2019.*
[16] Aris Nurlailiyah. Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta. *Realita* Vol. 17 No. 1 Januari 2019. Hlm 13-21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengimplementasikan suatu kebijakan publik, maka harus di laksanakan dengan perencanaan yang matang (planning). Dalam membicarakan planning (perencanaan) pembangunan, maka setidak-tidaknya ada dua pendekatan yang harus dipergunakan sebagai metode pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan secara administrasi negara (*public administration*)
b. Pendekatan secara manajerial (*management approach*).

4. Sistem zonasi

Sistem Zonasi adalah Penataan Reformasi Dalam Pembagian Wilayah Sekolah. Secara keseluruhan sistem zonasi yang berlaku saat ini merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Sistem Zonasi mengatur mengenai zona wilayah bagi calon siswa baru yang akan mendaftar ke sekolah negeri. Perturan ini ada dalam Sistem PPDB melalui Permendikbud No.14 Tahun 2018. Sistem zonasi ini prinsipnya hampir sama dengan sistem bina lingkungan, hanya saja pada jumlah kuota sistem zonasi ini jauh lebih banyak dibandingkan bina lingkungan yaitu mencapai 90%.

Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualita. Diharapkan mampu menyinergikan tripusat pendidikan sekolah. Yakni memberikan kesadaran kepada masyarakat dan keluarga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara umum, bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya di satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama.[17]

F. Penelitian Terdahulu

Merujuk pada penelitihan sebelumnya, diharapkan penelitian kali ini dapat melengkapi dari sisi kekurangan penelitian sebelumnya dan dapat mempelajari kelebihan yang ada dalam penelitian sebelumnya. Berikut uraian mengenai penelitian sebelumnya:

1. Afriani Rolenta Naibaho. *"Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Online Tingkat Sekolah Menengah Atas di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara."* Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. 2018.

   Teori pada penelitian ini menggunakan teori Kebijakan publik menurut Thomas Dye. Dalam teori tersebut menjelasakan bahwa kebijakan publik merupakan sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik[18].

---

[17] Aris Nurlailiyah. Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta. *Realita* Vol. 17 No. 1 Januariuari 2019. Hlm 13-21.

[18] Afriani Rolenta Naibaho. *"Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Online Tingkat Sekolah Menengah Atas di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara."* Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. 2018. Hlm 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fokus penelitian Afriani Rolenta Naibaho pada Implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yang menggambarkan fenomena sebenarnya dari kejadian di lapangan. Lokasi penelitian yang dilakukan Afriani Rolenta dilakukan di Dinas Pendidikan, SMAN 13 dan SMAN 2 Medan Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian yang akan dilakuan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh Rahayu Kusuma Dewi. Dimana dalam teorinya menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, mengatur prilaku dengan tujuan menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat.[19] Peraturan yang dimaskud adalah kebijakan zonasi. Teori ini dikaitkan dengan pemerataan layanan pendidikan.

Berfokus penelitian adalah pada implementasi kebijakan sistem zonasi dalam pemerataan layanan pendidikan. Pada penelitian yang akan dilakukan juga menggunakan metode kualitatif deskirptif. Lokasi Penelitian akan dilakukan di SMA Negeri 5 Surabaya.

2. Eka Reza Khadowmi *"Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah."*

Teori yang digunakan dalam penelitian Eka Reza Khadowmi adalah teori kebijakan publik menurut Robert Eyeston. Dalam penjelasannya

[19]Rahayu Kusuma Dewi. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: Pustka Setia Hlm. 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan publik adalah hubungan unit pemerintah dengan lingkunganya**.**

Fokus penelitian yang dilakukan oleh Eka Reza Khawidowni adalah pada implementasi kebijakan sistem zonasi terhadap proses penerimaan peserta didik.

Metode yang digunakan oleh Eka Reza Khawidowmi adalah deskriptif kualitatif, dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dihasilkan dari penelitian dilapangan kedalam bentuk penjelasan dengan cara sistematis sehingga memiliki arti dan dapat dirangkum.

Penelitian yang akan dilakuan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh Rahayu Kusuma Dewi. Dimana dalam teorinya menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, mengatur prilaku dengan tujuan menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat.[20] Peraturan yang dimaskud adalah kebijakan zonasi. Teori ini dikaitkan dengan pemerataan layanan pendidikan.

Berfokus penelitian adalah pada implementasi kebijakan sistem zonasi dalam pemerataan layanan pendidikan. Pada penelitian yang akan dilakukan juga menggunakan metode kualitatif deskirptif. Lokasi Penelitian akan dilakukan di SMA Negeri 5 Surabaya.

3. Kartika Marini. *"Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sma Negeri di Kota Bandar Lampung".*

[20]Rahayu Kusuma Dewi. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: Pustka Setia Hlm. 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung 2019.

Teori Kebijakan Publik Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi. Fokus penelitian Kartika Marini pada implementasi dan hambatan yang ditemui dalam kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi. Metode pendekatan kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian Kartika Marini SMA Negeri Di Kota Bandar Lampung.

Sedangkan Penelitian yang akan dilakuan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh Rahayu Kusuma Dewi. Dimana dalam teorinya menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, mengatur prilaku dengan tujuan menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat.[21] Peraturan yang dimaskud adalah kebijakan zonasi. Teori ini dikaitkan dengan pemerataan layanan pendidikan.

Fokus penelitian adalah pada implementasi kebijakan sistem zonasi dalam pemerataan layanan pendidikan. Pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif deskirptif. Lokasi Penelitian akan dilakukan di SMA Negeri 5 Surabaya.

4. Desi Wulandari. ”*Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas Vii Di Smpn 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018”.* Pendidikan

[21]Rahayu Kusuma Dewi. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: Pustka Setia Hlm. 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Penidikan Universitas Lampung 2018.

Teori penelitian Desi Wulandari Penerimaan peserta didik baru melalui zonasi oleh Asri ulfah. Fokus penelitian Desi Wulandari Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 32 responden. Lokasi SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018.

Sedangkan Penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh Rahayu Kusuma Dewi. Dimana dalam teorinya menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, mengatur prilaku dengan tujuan menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat.[22] Peraturan yang dimaskud adalah kebijakan zonasi. Teori ini dikaitkan dengan pemerataan layanan pendidikan.

Fokus penelitian adalah pada implementasi kebijakan sistem zonasi dalam pemerataan layanan pendidikan. Pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif deskirptif. Lokasi Penelitian akan dilakukan di SMA Negeri 5 Surabaya.

[22]Rahayu Kusuma Dewi. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: Pustka Setia Hlm. 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Dyah Refti Pujianti. *"Upaya Pemeataan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah di Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo."* Manajemen Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta. 2012.

Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Refti Pujianti menggunakan teori pemerataan pendidikan yang disampaikan oleh Riant Nugroho. Teori pemerataan pendidikan ini membahas mengenai indikator pemerataan pendidikan dapat dilihat dari jumlah sekolah perpenduduk usia sekolah, jumlah guru, jumlah siswa persekolah, jumlah putus sekolah, serta jumlah buta huruf.[23] Sedangkan penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh Rahayu Kusuma Dewi. Dimana dalam teorinya menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, mengatur prilaku dengan tujuan menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat.

Fokus pada penelitian Dyah Refti Pujianti adalah pemerataan pendidikan pada jenjang sekolah menengah, sedangkan fokus pada penelitian ini adalah pada implementasi kebijakan zonasi dalam pemerataan akses layanan pendidikan.

Metode penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitaf dalam menggelola dan penyajian data. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam

[23] Dyah Refti Pujianti. *"Upaya Pemeataan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah di Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo."* Manajemen Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta. 2012. Hlm 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengumpulkan data higga penyajian data yang telah diperoleh. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh Dyah Refti Pujianti dilakukan di Bondowoso. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan di Surabaya dengan studi kasus di SMA Negeri 5.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

Bab pertama, ialah pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, serta keaslian penelitian yang dibuktikan dengan justifikasi penelitian terdahulu yang relevan.

Bab kedua, ialah tinjauan pustaka yang terdiri dari dari : membahas mengenai teori yang berkenaan dengan implementasi kebijakan, model implementasi kebijakan, teori kebijakan pendidikan, tahapan implementasi kebijakan, sistem zonasi, pemerataan layanan pendidikan.

Bab ketiga, adalah metode penelitian. Pada bab ini peneliti menyebutkan dan menjelaskan mengenai pendekatan, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data.

Bab keempat, adalah hasil penelitian yang berisi penjelasan mengenai gambaran umum, deskripsi subjek, penyajian data yang menjelaskan fakta-fakta mengenai masalah yang diteliti, hasil analisis data dan hasil uraian yang akan dijelaskan dalam sub bab pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima, adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemerataan layanan Pendidikan

Pendidikan di Indonesia sesungguhnya telah menjadi salah satu perhatian kusus untuk dilihat bagaimana akses pemerataan yang bisa dinikmati oleh seluruh warga negara. Pendidikan akan berkaitan tentang hak asasi sekaligus untuk merealisasikan hak asasi manusia yang lainya.[24] Pendidikan adalah hak seluruh rakyat. Merujuk pada hadits yang menyampaikan keutamaan menuntut ilmu adalah sebagai berikut:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ
وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S 16: 90).

1. Pengertian pemerataan

Pemerataan dalam kamus bersar bahasa indonesia memiliki arti cara atau perbuatan meratakan sama sama mendapat jatah yang sama. pembangunan bertujuan memujudkan keadilan sosial.[25] Pada pemerataan terdapat dua aspek yang harus diperhatikan, yakni persamaan untuk memperoleh pendidikan dengan dapat dapat dinikmati oleh semua

[24] Lukman Hakim, Pemerataan Akses Layanan Pendidikan bagi Rakyat Sesuai dengan Amanat Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal EduTech* Vol. 2 No. 1 Maret 2016 ISSN: 2442-6024. Hlm 59.
[25] Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia. Surabaya*: Reality Publisher, 2008. Hlm. 544.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penduduk yang berusia sekolah dan keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat yaitu pendidikan bisa di akses oleh antar suku, agama dan kelompok secara sama[26].

Adanya pemerataan kualitas pendidikan, anak-anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Pemerataan pendidikan bisa disebut perluasan kesempatan belajar yang mana merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini memiliki tujuan agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan.[27]

Indikator pendidikan berkualitas menurut Kementerian Pendidikan dan kebudayaan terdapat lima indikator yang benar-benar menggambarkan situasi pendidikan di Indonesia, yaitu[28]:

a. Ketersediaan layanan pendidikan.
b. Keterjangkauan layanan pendidikan.
c. Kualitas layanan pendidikan.
d. Kesetaraan memperoleh layanan pendidikan.
e. Kepastian memperoleh layanan pendidikan.

Perluasan pendidikan yang mana telah diatur sejak tahun 1984 tentang pemerataan sekolah dasar, kemudian adanya wajib belajar sembilan tahun

[26] Aris Nurlailiyah, Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta. realita Vol. 17 No. 1 Januariuari 2019. Hlm. 14.
[27] Lukman Hakim. Pemerataan Akses Layanan Pendidikan bagi Rakyat Sesuai dengan Amanat Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. ISSN: 2442 6024. *Jurnal EduTech* Vol. 2 No. 1 Maret 2016. Hlm. 62.
[28]Aris Nurlailiyah, Analisis Kebijakan Sistem Zonasi terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta, *Realita*, Vol 17 2019. Hlm. 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada 1994 yang mana aturan ini adalah lanjutan dari peraturan wajib belajar 6 tahun[29]. Kebijakan selanjutnya adalah adanya program orang tua asuh yang lebih fokus pada membantu siswa yang termasuk keluarga kurang mampu dalam hal finansial. Program pemerataan kemudian diperbaruhui dengan memberikan dana Bantuan Oprasional Sekolah dan lain sebagainya.

Masalah pemerataan pendidikan adalah bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan untuk seluruh warga negara yang seluas-luasnya dalam memperoleh pendidikan. Pendidikan sebagai wahana pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan.[30]

Permasalahan pemerataan pendidikan dapat muncul jika masih banyak warga negara khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat ditampung dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas yang ada. Dalam upaya pemecahan masalah pemerataan pemerintahan memiliki upaya-upaya yang ditempuh guna pemerataan pendidikan, upaya ini terbagi menjadi dua, yakni secara konvensional dan dan cara inovasi. Cara konvensional adalah dengan[31] Membangun gedung sekolah seperti SD Impres atau tambahan kelas. Atau dengan membangun kelas untuk dua sift (pergantian kelas pagi dan siang).

---

[29] Aris Nurlailiyah. Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta. Hlm. 14.
[30] Zaini Tamin AR DKK. Politik pendidikan (konsep dan praktik kebijakan pendidikan di Indonesia), Sidoarjo, CV. Dwiputra Pustaka Jaya. 2018. Hlm. 10.
[31] Nanang Fattah., Analisis Kebijakan Pendidikan. 2014. Hlm 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerataan pendidikan dapat dilakukan dengan cara inovasi berupa guru pamong, SD kecil pada daerah terpencil, sistem guru kunjung, SMP terbuka, kejar paket A dan B, belajar jarah jauh seperti Universitas Terbuka.

Peraturan guna pemerataan layanan pendidikan kini muncul dengan sistem jalur zonasi pada penerimaan peserta didik baru pada sekolah negeri. Hal merupakan suatu kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat kemudian disalurkan pada Pemerintah Daerah.

2. Pendekatan Pemerataan

Mengimplementasikan suatu kebijakan publik, maka harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang (planning). Dalam membicarakan planning (perencanaan) pembangunan, maka setidak-tidaknya ada dua pendekatan yang harus dipergunakan sebagai metode pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan secara administrasi negara (*public administration*)
b. Pendekatan secara manajerial (*management approach*).[32]

Kedua metode ini dapat diartikan bahwa, pemerataan dapat melalui kebijakan negara, calon peserta didik baru seluruhnya dapat memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan layanan satuan pendidikan. Dan yang kedua adalah kesamaan dalam pelayanan pada satuan pendidikan.

[32] Anwar Arifin. Paradigma baru pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Hlm. 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pengertian layanan pendidikan

Layanan pendidikan merupakan bagaian dari layanan publik. Hal tersebut dikarenakan kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik dibidang pendidikan. kebijakan pendidikan bertujuan mensejahterakan pengguna pendidikan. pelayanan pendidikan dapat dikatakan prima jika:

Transparan, yakni layanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses semua pihak yang membutuhkan. Akuntabilitas yang mana dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisional, yakni layanan yang sesuai kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya adalah partisipasi mendorong peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan yang mendengarkan aspirasi kebutuhkan rakyat. Selanjutnya adalah kesamaan hak dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lainnya. Keseimbangan hak dan kewajiban juga menjadi faktor primanya sebuah layanan. Dimana mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima layanan.[33] Adanya layanan pendidikan ditujukan untuk meningkatkan mutu dan pembaruan sistem pendidikan.[34]

[33] Lijan Poltak Sinambela dkk, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008, Hlm 6.

[34] Mujianto Solichin dan Imama Kutsi. Implementasi Pemendibud Nomor 14 tahun 2018 tentang penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Sistem Zonasi pada Tingkat Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar di Kecamatan Jombang., *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam,* Vol 5 No 1 Juni 2019. Hlm. 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bentuk Layanan Pendidikan

layanan pendidikan secara garis bersar dapat diartikan sebagai berikut[35]:

a. Layanan informasi.

Layanan ini dapat sampaikan secara langsung dalam bentuk lisan maupun tidak langsung berupa tertulis. Informasi lisan dapat disampaikan melalui kontak langsung dengan tatap muka. Sedangkan informasi tertulis dapat diberikan melalui media baik cetak berupa surat, buku, pamflet atau dalam jaringan seperti website.

b. Layanan sarana prasarana

Layanan sarana prasarana merupakan layanan dalam bentuk menyediakan sarana dan prasarana atau fasilitas dapat berupa: ruangan, kelas, laboratorium, meja, kursi, alat elektronik, kertas, hingga alat tulis kantor dan lain sebagainya.

c. Layanan administrasi

Layanan adminitrasi adalah layanan yang berkiatan dengan berkas, pembayaran, surat keterang dan lain sebagainya.

d. Layanan bimbingan

Layanan bimbingan dapat diawali dengan program sekolah berupa orientasi sekolah, bimbingan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan khususnya dalam belajar dan juga masalah pribadi, bimbingan pendidikan dan pengajaran (KBM), dan bimbingan praktik keilmuan.

[35] Marzuki Mahmud, Manajemen Mutu Perguruan Tinggi, Jakarta: PT RajaRafndo Persada, 2012, hlm 63-65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Layanan pengembangan bakat dan minat serta keterampilan

Layanan pengembangan bakat dan minat dapat melalui kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa.

f. Layanan kesejahteraan

Bentuk layanan kesejahteraan kepada siswa ini dapat berupa pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi, keringanan SPP dan lain sebagainya.

B. Implementasi Sistem zonasi

Pada dasarnya pendidikan laksana eksperimen yang tidak pernah selesai sampai kapanpun, karena pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang yang terus berkembang.[36] Dengan adanya perkembangan budaya disuatu masyarakat maka kebijakan pendidikan muncul sebagai upaya mengikat dan menjadi ketetapan pada kurun waktu tertentu. Proses implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat menentukan sekaligus menegangkan.[37] Dengan pendidikan yang selalu berkembang, maka membutuhkan peraturan dan kebijakan yang diperbarui dengan implementasi kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada. Sistem zonasi adalah sebuah bentuk kebijakan dalam dunia pendidikan yang berlandaskan perkembangan keilmuan pada peradaban manusia.

[36]M. Hasbullah. *Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015. Hlm. 3.
[37] M. Hasbullah. *Kebijakan Pendidikan.* Hlm 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian implementasi

Implementasi merupakan terjemahan dari kata *implemention* berasal dari kata kerja *to implement*. To implement berasal dari bahasa latin, implementum dari asal kata impere dan plere. Kata *implere* dimaksudkan *to fill up; to fill in*, yang memiiki arti pengisi penuh, melengkapi.[38] Secara etimologi implementasi merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.[39] Maka dapat diartikan bahwa implementasi adalah tahapan dalam upaya atau usaha menyelesaikan suatu pekerjaan dengan menggunakan sarana guna mencapai hasil yang telah ditentukan.

Menurut *Peter de Leon* dan Linda *de Leon* pendekatan dalam implementasi kebijkan publik dapat dikelopokan menjadi tiga generasi. Generasi pertama ialah pada tahun 1970-an dimana memahami implementasi kebijakan sebagi masalah-masalah yang terjadi antara kebijakan dengan eksekusinya dimana berimpitan dengan studi pengambilan keputusan pada sektor publik.[40] Pada generasi ke dua yakni terjadi pada tahun 1980-an, pendekatan implementasi yang bersifat dari atas ke bawah (*top-downer perspective*). Selanjutnya pada generasi ke tiga, yang berlangsung pada tahun 1990-an. Pada generasi ini menjelaskan bahwa variabel prilaku dari aktor pelaksana implementasi kebijakan yang lebih menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

---

[38] Rahayu kusuma dewi. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung:Pustaka Setia. Hlm. 153.
[39] TachJanuari. Implementasi Kebijakan publik, cet. 1, Bandung: AIPI. 2006. Hlm. 24
[40] Rahayu kusuma dewi. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung:Pustaka Setia. Hlm 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada saat yang sama muncul pendekatan kontingensi atau situasional dalam implementasi kebijakan. pada pendekatan ini menjelaskan implementasi banyak didukung oleh adaptabilitas implementasi kebijakan tersebut.[41] kemunculan ilmuan yang membahas implementasi kebijakan dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dengan model Top Down Approach.

   Teori ini menjelaskan bahwa, implementasi kebijakan akan berjalan dengan sempurna jika mempunyai persyaratan yang pertama, Kondisi eksternal yang tidak menimbulkan gangguan atau hambatan. Yang kedua adalah tersedianya sumber-sumber yang memadai dan waktu yang cukup. Yang ketiga adalah perpaduan sumber-sumber yang tersedia. Pada syarat yang kedua dan ketiga ini menitik beratkan pada sumber daya yang tersedia dan terorganisasi dengan baik.

   Selanjutnya syarat yang ke empat adalah adanya hubungan kapasitas antara rencana dengan pelaksanaannya. Adanya hubungan sebab akibat yang bersifat langsung dan hanya sedikit *linkage*-nya. Selanjutnya, adanya pemahaman yang mendalam dan kesepakatan tentang tujuan. Adanya tugas-tugas yang terperinci dan diurutkan dengan tepat. Adanya komunikasi yang sempurna. Dan yang terakhir adalah adanya pihak berwenang yang dapat mengklaim dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

[41] Riant Nugroho. *Public Policy*, Jakarta: Elekmedia Komputindo, 2008. Hlm 664.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn.

Donald Van Meter dan Carl Van Horn mengemukakan model ini pada tahun 1975. Model ini merupakan model klasik atau model permata. Model ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, impelementator, dan kinerja kebijakan publik.[42]

Beberapa variabel yang dimasukan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijkan publik ada empat pokok pembahasan. Yang pertama adalah aktivitas implementasi dan komunikasi antar anggota. Yang kedua adalah karakteristik dari agen pelaksana atau implementator. Kondisi ekonomi sosial politik juga menjadi salah satu variabel yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan publik. Dan yang terakhir adalah kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana atau kebijakan implementator.

Van Meter dan Van Horn menyatakan, jika ditinjau dari aspek tipologi kebijakan dan variabel bebas. Model proses implementasi kebijakan terdiri 2 hal, yakni jumlah dari masing-masing perubahan yang diharapkan dan jangkauan atau lingkup kesepakatan atas tujuan antar pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Sedangkan mereka menjelaskan untuk variabel bebas yang memisahkan kebijkana dari proses kerja adalah ukuran dan tujuan

[42] Rahayu Kusuma Dewi, Studi Analisis Kebijakan, 2018. Hlm 164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar anggota terkait kegiatan pelaksana, sikap para pelaksan, dan lingkungan.[43]

c. Model Edward III

Edward III menjelaskan model implementasi kebijakan memiliki 4 isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif. Ke empat isu ini adalah komunikasi, sumber data, sikap, struktur birokrasi. Ke empatnya dapat dijelaskan sebagai berikut di Komunikasi sering juga disebut *communication* yang mana cara untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Dengan mengkomunikasikan kebijakan program kegiatan kepada publik dan internal dapat memberoleh masukan agar lebih baik.

Sumber daya (*Resource*) berkaitan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya manusia. Hal ini berkaitan dengan kecakapan dalam dari pelaksana kebijakan publik secara efektif. Dan sumber daya lainnya seperti ekonomi dan lainnya juga dibutuhkan dalam implementasinya.

Sikap (*Disposition or attitudes*) juga dapat diartikan sebagai kesediaan dari implementator untuk melaksanakan kebijakan tersebut. tidak hanya kecakapan yang dibutuhkan dalam implementasi. Perlunya komitmen dan kesediaan dalam menjalankan kebijakan.

Struktur birokrasi (*Bureaucratic struture*) adalah kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi

[43] Rahayu kusuma dewi. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung:Pustaka Setia. Hlm 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan. pada model ini menjelaskan adanya tantangan yang harus dihadapi, yakni mencegah *bureaucratic fragmentation*. Karena hal ini akan menjadikan implementasi jauh dari efektif.[44]

2. Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan dipergunakan secara luas, istilah ini berkaitan dengan kebijakan ekonomi, kebijakan publik dan lain sebagainya. Kata kebijakan dalam bahasa ingris ialah *policy* digunakan untuk menunjukan perilaku aktor(misalnya pejabat, kelompok, atau lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.[45] Menurut Ealau dan Prewitt dalam Suharto, kebijakan adalah ketetapan yang berlaku dicirikan oleh prilaku yang konsisten dan berulang, baik dari pihak yang membuatnya maupun pihak yang mentaatinya (yang menjalankan kebijakan)[46] Kebijakan dapat diartikan sebagai aturan dalam bentuk tertulis dan keputusan resmi suatu organisasi yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik dalam lingkup publik maupun privat.[47] Teori implementasi kebijakan pendidikan

Sebuah kebijakan dilaksanakan tidak hanya bersangkutan pada mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik dalam prosedur rutin yang melalui saluran birokrasi yang ada. Namun lebih luas menyangkut masalah konflik, pilihan keputusan, dan siapa yang mendapat apa dari

[44] Rahayu kusuma dewi. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung:Pustaka Setia. hlm. 168.
[45] Rahayu kusuma dewi. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung:Pustaka Setia. hlm.15.
[46] Edi Suharto, Pembangunan, Kebijakan Sosial dan pekerjaan sosial:sprektum pemikiran. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan, 1997. Hlm 34.
[47] Rahayu kusuma dewi. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung:Pustaka Setia.Hlm. 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerapan sebuah kebijakan. Cukup banyak teori yang menjelaskan tentang implentasi kebijakan pendidikan, berikut penjabarannya:

a. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn

Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dalam Hasbullah, keduanya adalah ilmuan politik pencetus teori pendekatan he top down approach. Untuk memperoleh suatu implementasi kebijakan secara sempurna maka dibutuhkan syarat pada kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang berarti.

Pada pelaksanan progam harus tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai. Perpaduan sumber yang diperlukan hars benar-benar ada atau tersedia.[48] Sumber-sumber yang dimaksud dapat berupa sumber daya manusia atau sumber daya alam dan yang lainnya.

Kebijakan yang akan diterapkan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal. Hubungan kausalitas hendaknya bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai pengubungnya. Hubungan saling ketergantungan harus kecil. Adanya pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Dan adanya komunikasi koordinasi yang sempurna.

[48] Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers. 2015. Hlm 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Teori Van Meter dan Van Horn

Gagasan teori Van Meter dan Van Horn diawali pengajuan pertanyaan mengapa ada implementasi yang berhasil dan mengapa ada implementasi yang gagal?[49]Pertanyaan ini dijawab dengan menyampaikan enam variabel, yakni dua variabel utama dan empat variabel tambahan yang membentuk kaitan antara kebijakan dan kinerja kebijakan. Keeneam variabel tersebut meliputi: standar dan tujuan kebijakan; sumber daya; komunikasi; interorganisasi dan aktivitas pengukuhan; karakteristik agen pelaksana; kondisi sosial; ekonomi dan politik; dan karakter pelaksana.[50]

c. Teori Daniel Mazmainan dan Paul A. Sabatier

Variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal implementasi tersebut selanjutnya dapat disaksikan menjadi tiga kategori besar, yakni:

Pertama, mudah tidaknya masalah yang akan digarap untuk dikendalikan. Yang kedua, kemampuan dari keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya. Dan yang ketiga pengaruh lingkungan sebagi variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut. lingkungan dapat mempengaruhi keberhasilan dari adanya kebijakan karena keterlibatan penerima program.

[49] Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*, hlm. 97.
[50] Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*, *hlm.* 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Teori Edward

Variabel kritis agar implementasi kebijakan pendidikan menjadi efektif ada 4, yakni komunikasi, sumber daya, *dispositoin* atau sikap, serta struktur birokrasi.[51]

Komunikasi berkenan dengan kebijakan pendidikan yang dikomunikasikan pada ranah organisasi publik. Hal ini berhubungan dengan ketersediaan sumber daya manusia, tanggapan dari pihak yang terlibat, dan struktur pelaksana kebijakan pendidikan. Yang dapat diperhatikan pada komunikasi adalah transmisi komunikasi, kejelasan kebijakan pendidikan, dan konsistensi.

Sumber daya ada kaitannya dengan ketersediaan sumber daya pendukung dan sumber daya manusia. Kecakapan pelaksanaan kebijakan pendidikan agar berjalan secara efektif. Kemampuan manusia sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan pendidikan. *Disposition* atau sikap.

3. Langkah-langkah implementasi kebijakan pendidikan

Sebagai suatu produk, kebijakan pendidikan sering tidak diformulasikan berdasarkan elemen-elemen yang perlu diintegrasikan secara sinergi. Kebijakan tersebut sudah utuh atau masih terlepas dari ruang lingkupnya. Kebijakan memiliki alur tersendiri. Berikut tata urutan implementasi kebijakan pendidikan:

[51] Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*,hlm. 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 2. 1 Langkah-Langkah Implementasi Kebijakan Pendidikan

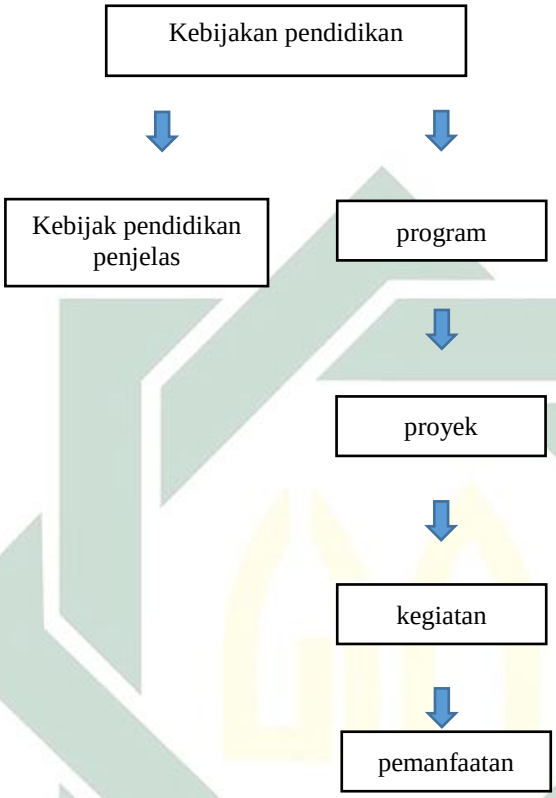

(Mengacu pada Dunn 2004)

Impelentasi kebijakan merupakan pengambilan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, tidak ada acuan baku tentang langkah-langkah implementasi kebijakan pendidikan.[52] Namun jika merujuk pada alur berfikir kerangka peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara NO. PER/04/M-PAN/4/2007 Tentang pedoman umum formulasi, implementasi, evaluasi kerja, revisi kebijakan publik di lingkungan

[52] Hasbullah . *Kebijakan Pendidikan*. Hlm 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga pemerintah pusat dan daerah, langkah-langkah yang ditempuh dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan adalah sebagaiberikut:

Penyiapan implementasi kebijakan pendidikan (0-6 bulan). Kegiatan didalamnya adalah sosialisasi, pemberdayaan para pihak pelaksana kebijakan pendidikan, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat. Pada tahap ini sosialisasi dilakukan dengan cara menyebarluaskan informasi kepada masyarakat memalu berbagai media serta pertemuan langsung dengan masyarakat.

Implementasi kebijakan pendidikan dilakukan tanpa sanksi, atau dapat disebut dengan masa uji coba. Pada masa pelaksanaan kebijakan ini ada pembatasan pada jangka waktu tertentu. Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan dapat dilakukan jika diperlukan.[53]

Implementasi kebijakan pendidikan dengan sanksi. Sanksi dilakukan setelah masa uji coba selesai. Dalam penerapannya disertai dengan pengawasan dan pengendalian. Setelah dilakukannya implementasi kebijakan pendidikan selama tiga tahun, dilakukanlah evaluasi kebijakan pendidikan.

4. Pengertian Sistem Zonasi

Sistem zonasi adalah sebuah kebijakan mengenai penerimaan siswa baru. Peraturan ini ditujukan pada jenjang pendidikan mulai taman kanak-kanak, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas pada satuan lembaga yang dibawah naungan pemerintah bukan swasta. Hal ini

[53]Hasbullah . *Kebijakan Pendidikan.* Hlm 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan munculnya permasalah sekolah unggulan yang mengakibatkan kebanyakan siswa cenderung memilih sekolah yang memiliki gelar favorit ketimbang sekolah yang berada di dekat rumahnya.

Sistem zonasi adalah sistem yang mengatur penerimaan peserta didik baru. Kebijakan ini dibuat pada tahun 2017 dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 17 tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru dari jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan kejuruan. Pemberlakuan sistem ini dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing. Pada tahun selanjutnya diamandemen pada Peraturan Menteri no 14 tahun 2018, kemudian diamandemen pada Peraturan Menteri no 51 tahun 2018 dan mengalami perubahan kembali yang dimuat pada Peraturan Menteri no 20 tahun 2019. Perbedaan siknifikan terlihat pada besar presentase kuota yang digunakan dalam pelaksanaan sistem zonasi.

Pada kebijakan tahun 2017 dan 2018 satuan pendidikan wajib menerima calon peserta didik melalui jalur zonasi sebesar 90% dari julmah kuota yang dimilik. 5% digunakan pada jalur prestasi dan 5% digunakan pada jalur alasan khusus (pindah domisili orang tua misalnya)[54].

Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu. Penerimaan diranking dari total jumlah peserta didik yang akan diterima.*whether the PPDB policy*

[54] Novrian Satria Perdana. Implementasi Ppdb Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*. P.ISSN: 2579-5082. Vol 3. 2019. Hlm 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

based on the zoning system can improve education equity.[55] Sedangkan pada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 20 tahun 2019 memuat presentase penerimaan jalur zonasi sebesar 80%, paling banyak menerima siswa jalur prestasi sebesar 15%, dan penerimaan siswa jalur khusus sebesar 5%. Kebijakan sistem zonasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, yakni menteri pendidikan, kemudian diperinci kembali oleh masing-masing daerah provinsi.

[55] Cecep Wahyu Hoerudin. "Evaluation Of New Student Admission Policy Based On Zonation System In Bandung City*" JISPO* VOL. 9 No. 2 Edisi: Juli-Desember Tahun 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif atau *descriptive research.* Pemilihan pendekatan dan metode ini bertujuan untuk menagkap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian mengolah data dan menggambarkannya secara naratif. Hal ini didukung oleh pendapat steven dukeshire dann Jenneifer yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang bukan angka, mengumpulkan data, menganalisis data yang bersifat naratif.[56]

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan dikota surabaya. Pemilihan jenjang pendidikan dipilih pada tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Surabaya. Hal ini dikarenakan sekolah ini adalah Negeri dimana wajib menerapkan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan calon siswa baru.

SMA Negeri 5 Surabaya memiliki jumlah peminat 475 pemilih, dan 427 diantaranya pemilih pertama pada tahun 2019. seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sekolah ini juga menduduki peringkat pertama berdasarkan nilai rata-rata lulusan tahun 2019 dengan total rata-rata 86,65. Sekolah ini termasuk

[56] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung: Alfabeta. 2018. Hlm 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam sekolah percontohan yang mana menjadi favorit dikalangan calon peserta didik dan wali murid untuk menuntut ilmu di sini.

C. Sumber Data

Sumber data adalah objek atau sasaran yang diteliti dalam berbagai wujud, bahan, jenis, atau bentuk tertentu. Objek atau sasaran sebagai maksud biasanya dikenal dengan istilah sumber, data, atau fakta historis.[57] Sumber data yang digunakan harus berkaitan dengan judul yang diangkat oleh peneliti agar dalam penggalian dilapangan tidak terjadi pembiasan atau melebarnya data. Hal ini juga menghindari data sampah, dimana tidak ada korelasinya dengan judul penelitian.

Wujud atau realitasnya, dapat dibagi ke dalam kategori formal-nonformal, primer-sekunder, dan tertulis-tidak tertulis.[58] Dalam penelitan ini menggunakan sumber data primer-skunder yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

   Disebut primer apabila data memiliki posisi bahan paling penting dan paling logis dipercaya.[59] Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dolumen dan

[57] Imam bawani, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam.* Sidoarjo: Khazanah Ilmu Sidoarjo. 2016. Hlm. 269-270.
[58] Dudung Abdurahman dalam buku Imam bawani *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam.* Sidoarjo: Khazanah Ilmu Sidoarjo. 2016. Hlm. 270.
[59] Imam bawani, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam.* Sidoarjo: Khazanah Ilmu Sidoarjo. 2016. Hlm.272

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain-lain.[60] Memiliki kedudukan informasi utama pada kegiatan penelitian ilmiah. Pada penelitian kali ini sumber data primer adalah:

a. Peraturan pemerintah terkait sistem zonasi, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
b. Wawancara dengan pihak sekolah selaku pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan.
c. Wawancara cabang dinas pendidikan wilayah Sodiarjo terkait implementasi sistem zonasi.

2. Sumber Data Sekunder

Dari segi bahasa, sekunder biasa diartikan dengan nomor atau urut ke dua. Sesuatu yang ditempatkan sebagai bahan dasar penelitian pada urutan ke dua atau posisi sekunder. Biasa disebut sebagai sumber data pendamping atau pendukung.[61] Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa:

a. Data badan pusat statistik terkait jumlah penduduk usia sekolah menengah atas di Surabaya.
b. Data pengelolaan pemerataan layanan pendidikan di sekolah.
c. Wawancara Dewan pendidikan terkait implementasi sistem zonasi.

Berikut adalah pemberian kode untuk sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian.

[60] Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . hlm 157.
[61] Imam bawani, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam.* Sidoarjo: Khazanah Ilmu Sidoarjo. 2016. Hlm. 272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3. 1 Tabel Kode Pengumpulan Data

No	Jenis pengumpulan data	Kode
1	Wawancara	(W/ Nama/Jab/NoSPP/Tanggal)
2	Observasi	(O/No K/Tempat/Tanggal)
3	Dokumentasi	(D/Sumber/Nama Dokumen/Tanggal)

Keterangan:

W = Wawancara

O = Observasi

D = Dokumentasi

Nama = Nama informan yang diwawancara

Nama dok = Nama dokumentasi

Jab = Jabatan informan

No SPP = No subjek partisipan penelitian

Tanggal = tanggal pengumpulan data

Tempat = tempat observasi

Sumber = sumber memperoleh dokumentasi

no K = Nomor kegiatan yang dilakukan berdasarkan tanggal

Tabel 3. 2 Tabel Informan Wawancara

No	Informan	Keterangan
1	Cabang dinas pendidikan wilayah Sidoarjo	Kepala seksi bidang SMA dan PKLK

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2	Dewan pendidikan	Perwakilan dewan pendidikan
3	Sekolah	3.1 Wakil kepala sekolah bidang humas
		3.2 Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan (selaku ketua panitia pelaksana PPDB 2019)
		3.3 Pengembang SKS
		3.4 gugu agama katolik (sekertaris panitia pelaksana PPDB 2019)
		3.5 Guru mata pelajaran
		3.6 Siswa

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.[62] Langkah langkah ini diperlukan oleh peneliti dalam menyusun isi dari penelitian. Selanjutya, bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), kuesioner (anget), dokumentasi dan data gabungan dari keempatnya.[63] Berikut penjelasannya:

[62] Sugiyono. *Metode Penelitan Kualitatif.* Bandung:Alfabeta. 2018. Hlm. 104.
[63] Sugiyono 2018. hlm. 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Melalui observasi, peneliti belajar tentang prilaku, dan makna dari prilaku tersebut.[64] Sanifiah Faisal dalam buku Sugiyono mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi secara terang-terangan dan tersamar, dan observasi tak berstruktur.[65] guna mempermudah macam observasi, sugyono menjelaskan macam-macam observasi sebagai berikut:

Observasi partisipatif (*participant observation)* ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedag diamati. Selain kegiatan pengamatan peneliti juga melakukan kegiatan yang dilakukan oleh sumber data. Pada observasi ini peneliti dapat memperoleh data lebih lengkap, tajam, dan mengetahui hingga tingkat makna dari setiap prilaku yang tampak.

Observasi terus terang dan tersamar ini melakukan pengumpulan data dengan menyampaikan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi sumber data mengetahui dari awal hingga akhir tentang aktivitas peneliti. Dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini menghindari jika suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasikan.

[64] Sugiyono 2018. hlm. 106.
[65] Sugiyono 2018. hlm. 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Observasi tak berstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena penelitian belum mengerti apa yang akan diamati. Fokus observasi akan berkembang selama observasi berlangsung. Peneliti melakukan pengamatan secara bebas, mencatat apa yang menarik, melakukan analisis dan menarik kesimpulan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan maka dalam suatu topik tertentu. Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan strudi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Esterberg mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, wawancara tidak terstruktur.[66]

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diteliti. Dalam melakukan wawancara terstrktur ini peneliti menyiapkan intrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternatif pertanyaannya telah disiapkan. Selain itu yang harus dipersipakan adalah *tape recorder*, gambar brosur dan materi lainnya guna membatu proses wawancara agar lancar.

Wawancara semi terstruktur, jenis wawancara ini termasuk kategori *in-depth interview*. Dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas

[66] Sugiyono *Metode Penelitian Kualitatif*, 2018. Hlm. 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan jenis ini untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Narasumber diminta pendapat dan ide-idenya. Peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat hal disampaikan oleh narasumber.

Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap dalam upaya mengumpulkan data. Pedoman yang digunakan adalah garis-garis besar perasalahan yang akan ditanyakan. Jenis ini sering digunakan dalam penelitian pendahuluan agar penelitian lebih mendalam tentang subjek yang diteliti.[67] Pada jenis ini peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh. Berdasarkan analisis dari setiap jawaban dari narasumber, peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan yang lebih terarah sampai pada tujuan.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah dari wawancara dari berbagai pihak yaitu:

a. Kepala dinas pendidikan tingkat cabang Jawa Timur.

   Pihak ini merupakan orang pertama yang penulis teliti Karena sebagai pemberi ijin penelitian dan pembuka jalan dengan responden lainnya. Informasi yang diperoleh dari pihak dinas pendidikan nantinya sebagai gambaran umum pelaksanaan sistem zonasi dalam pemerataan layanan pendidikan di Surabaya.

[67] Sugiyono. Hlm. 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kepala sekolah menengah atas negeri 5 Surabaya atau perwakilan

Kepala atau wakilnya sebagai tupuan implementasi kebijakan sistem zonasi pada satuan pendidikan. dengan demikian dapat memberikan informasi lengkap yang berkaitan dengan judul peneliti.

c. Ketua panitia PPDB tahun 2019 di SMA N 5 Surabaya.

Pemilihan Ketua panitia PPDB sebagai narasumber adalah sebagai pihak menyelenggarakan/melaksanakan kegiatan di sekolah.

d. Guru selaku pelaksana atau pendidik dan tenaga pendidik yang terkait.

Guru adalah pihak-pihak yang menyelenggarakan/melaksanakan kegiatan penerimaan peserta didik baru dan pelaksana pemerataan layanan pendidikan di sekolah. Selain itu juga sebagai komponen menyalurkan layanan pendidikan di sekolah.

e. Siswa

Siswa dipilih karena dirasa sebagai pihak yang merasakan kebijakan sistem zonasi dan pemeratan layanan yang dilakukan di sekolah sehingga dapat memberikan informasi terkait pokok pembahasan yang diangkat.

3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen tulisan misalnya catatan harian, boigrafi, peraturan, kebijakan, dan lainnya. Sedangkan dokumen gambar misalnya foto, sketsa, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya. Untuk dokumen karya dapat berupa film, patung, dan lain sebagainya.

Peneliti menggunakan ke tiga metode yang telah dijelaskan guna mengumpulkan data. Waktu perizinan penelitian pada bulan Desember 2019. Sedangkan untuk pelaksanaan penelitian mulai bulan Januari-Februari 2020. Media untuk merekam audio wawancara adalah gawai pribadi.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.[68]

Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.[69] Aktivitas dalam analisis data, yaitu, *data collection* (pengumpulan data), *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion*

[68] Sugiyono, 2007, hlm. 224.
[69] Sugiyono 2018. Hlm

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

drowing/verification.[70] Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan empat prosedur, berkut prosedurnya:

1. *Data collection* (pengumpulan data)

   Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi atau objek yang diteliti. Baik semua yang didengar, dilihat, direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.[71]

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

   Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan. Maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Data yang diperoleh di lapangan mungkin jumlahnya sangat banyak. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.[72]

3. Penyajian Data/ *Display*

   Dengan mendisplay atau menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami.

[70] Sugiyono, 2018, hlm 246.
[71] Sugiyono. 2018. 134
[72] (Sugiyono, 2007:247).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

Miles and Huberman dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, flowchart dan sejenisnya. Ia mengatakan "yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif".[73]

4. Verifikasi Data (Conclusions drowing/verifiying)

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidakdibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yag dikemukan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.[74]

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang didapat kemungkinan

[73] Sugiyono, 2007, hlm 249.
[74] (Sugiyono, 2007:252).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menjawab fokus penelitian yang sudah dirancang sejak awal penelitian. Ada kalanya kesimpulan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian kualitatif itu sendiri bahwa masalah yang timbul dalam penelitian kualitatif sifatnya masih sementara dan dapat berkembang setelah peneliti terjun ke lapangan.

Harapan dalam penelitian kualitatif adalah menemukan teori baru. Temuan itu dapat berupa gambaran suatu objek yang dianggap belum jelas, setelah ada penelitian gambaran yang belum jelas itu bisa dijelaskan dengan teori-teori yang telah ditemukan. Selanjutnya teori yang didapatkan diharapkan bisa menjadi pijakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.[75] Keabsahan data dilakukan guna membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah. Sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility, transferability, dependability, dan*

[75] (Moleong, 2007:320).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

confirmability.[76] Berikut penjelasan uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan:

1. *Credibility* (uji kredibilitas)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketentuan dalam penelitian, trianggulasi, diskusi dengan tema sejawat, analisis kasus negatif, dan *member ceck*.

a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan perngamatan berarti peneliti kembali kelapangan untuk melakukan pengamatan, wawancara kembali dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan ini hubungan antara peneliti dan sumber data akan semakin berbentuk *rapport*, akrab, semakin terbuka, dan saling mempercayai. Bila terbentuk raport maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, peneliti tidak menggangu prilaku yang dipelajari.[77] Dalam melakukan kredibilitas perpanjangan sebaiknya difokuskan pada data yang telah diperoleh.

Untuk membuktikan peneliti melakukan uji kredibilitas melalui perpanjangan pengamatan atau tidak, maka akan lebih baik jika membuktikan dengan surat keterangan perpanjangan. Selanjutna surat dapat dilampirkan dalam laporan penelitian.

[76] (Sugiyono, 2007:270)
[77] Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. 2018. Hlm 186-187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti meningkatkan kecermatan dan kesinambungan dalam melakukan pengamatan. Maka dengan cara ini maka kepastian dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Peneliti dapat melakukan pengecekan kembali data yang telah ditemukan itu salah atau tidak.[78] Guna meningkatakan ketekunan peneliti dapat membaca berbagai buku maupun hasil penelitian atau dokumen-dokumen yang terkait dengan temuan yang diteliti.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, cara, dan waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu.

1) Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diberoleh dapat berupa pengajuan pertanyaan kepada beberapa informan dengan satu tema yang sama. Hasil yang diperoleh dideskripsikan, dikategorikan, anatara pandangan yang sama, berbeda, dan spesifik dari tiga sumber tersebut. data yang telah dianalisis oleh peneliti dapat menghasilkan kesimpulan.

[78] Sugiyono, metode penelitian kualitatif. 2018. Hlm 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan sumber data tersebut.[79]

2) Triangulasi teknik

Triangulasi teknik adalah cara menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data awal diperoleh dari wawancara kemudian dicek kembali dengan dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi kembali dengan sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang benar.[80]

3) Triangulasi waktu

Waktu juga mempengaruhi kredibilitas data.[81] Data yang dikumpulkan dengan cara wawancara pada waktu pagi hari belum ada masalah, dan akan memberikan data yang valid. Berbeda dengan saat siang. Dalam rangka menguji kredibilitas peneliti dapat melakukan pengecekan data baik wawancara, observasi atau teknik yang lain pada waktu atau situasi yang berbeda.

d. Analisis kasus negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu.[82] Pelaksanaan analisis negatif

[79] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2018. Hlm 191.
[80] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2018. Hlm 191.
[81] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2018. Hlm 191.
[82] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2018. Hlm 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah diperoleh. Jika tidak ditemukan data yang bertentangan atau berbeda maka data yang terlah diperoleh dapat dipercaya. Sebaliknya jika data kasus ditemukan dengan ketentuan besar kasus negatif yang muncul, maka peneliti harus melakukan kredibilitas data kembali.

e. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.[83] Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto atau dokumen autentik. Alat yang dapat digunakan adalah kamera untuk mengambil foto kegiatan, alat rekam suara untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan.

f. Mengadalkan Member Check

Member chek adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.[84] Tujuannya adalah untuk mengetahui data yangtelah diperoleh sesuai dengan yang telah diberikan oleh pemberi data. Jika data yang diperoleh disepakati oleh pemberi data maka data valid, sehingga semakin dapat dipercaya. Pelaksanaanya dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data.

[83] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2018. Hlm 192.
[84] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* 2018. Hlm 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengujian *Transferability*

Transferability merupakan validasi eksternal dalam penelitian kualitatif. Validasi eksternal menunjukan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan hingga sampai mana hasil penelitian dapat diterapkan dalam situasi lain[85] Bagi peneliti nilai transfer bergantung pada pengguna, jika penelitian menggunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggung jawabkan.

3. Pengujian *Depenability*

Dalam peneltian kualitatif *depenability* disebut juga dengan reliabilitas.[86] Sebuah penelitian yang reliabel apabila orang lain dapat mengulang proses penelitian tersebut. uji ini dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai dan tidak dapat menunjukan jejak aktivitas lapangannya maka depenbabilitas penelitian patut diragukan.

4. Penjian *konfirmability*

Dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian. Penelitian dapat dikatakan objektif apabila telah disepakati oleh banyak orang. Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses pelaksanaan penelitian.[87]

---

[85] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* , 2018. Hlm 194.
[86] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif,* 2018. Hlm 194.
[87] Sugiyono. 2018. Hlm 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum SMA Negeri 5 Surabaya

1. Diskripsi lokasi

   a. Sejarah sekolah

Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Surabaya dibuka pada tanggal 1 Agustus 1957 sebagai pecahan SMA II/B, berasarkan surat keputusan menteri PP & K tanggal 18 Desember 1956 no 6738/B III. Pada tahun tersebut SMAN 5 Surabaya bernama SMA V/B (jurusan Pasti/Alam). Lokasiya ditempatkan pada gedung yang sama dengan SMA 1/A dan SMA II/B. Pada 18 Oktober 1957 terbentuknya persatuan pelajar, yang sekarang disebut dengan organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) yang sekaligus menjadi hari kelahiran SMA Negeri 5 Surabaya.

Sejak dibukanya SMA V/B pada tanggal 1 Agustus 1957 dimulai dengan 10 kelas yang terbagi atas 4 robongan belajar untuk kelas satu, 3 rombongan belajar kelas dua, dan 3 rombongan belajar kelas tiga. Saat itu SMA Negeri 5 memilki sumber daya manusia 25 orang, terdiri dari guru dan karyawan. Tahun 1963 adalah awal dibukanya penjurusan Pasti/Alam dan sosial budaya sekaligus perubahan nama SMA V/B menjadi SMA Negeri 5 Surabaya. Membangun tambahan kelas sebanyak 4 lokal dengan bantuan dari pemerintah. Dalam rentan waktu lima tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni pada tahun 1978 hingga tahun 1983, dibuka kelas pagi dan siang karena jumlah siswa semakin bertambah.

Pada masa kepemimpinan Soehartojo, kepala SMA Negeri 5 Surabaya periode 1983-1989, bentuk fisik SMA Negeri 5 Surabaya diubah. Sekolah yang semula beralamat di Jalan Wijaya Kusuma no 48 berubah menjadi Jalan Kusumabangsa no 21. Pada tahun 1994, SMA Negeri 5 Surabaya berhasil membangun 8 lokal baru, sehingga mulai saat itu kelas siang dihapuskan[88]. berdirinya perpustakaan dan masjid dengan bantuan dana dari pemerintah serta kerja sama dengan BP3. Berdirinya aula atas dengan bantuan dari Gubernur Jawa Timur.

b. Visi Misi dan Tujuan

Sekolah menengah atas negeri 5 Surabaya memiliki Visi "Berkembangnya manusia unggul, beriman, bertaqwa, mampu bersaing di era baru dan berwawasan lingkungan."[89] Visi yang dimiliki ini digunakan sebagai acuan dalam membuat misi, berikut misi dari SMA Negeri 5 Surabaya:

1) Menggambarkan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
2) Mengembangkan life skill melalui kegiatan intrakurikuler
3) Mengembangkan life skill melalui kegiatan ekstrakurikuler

[88] (D/sman5surabaya.sch.id/dokumen sejarah SMA Negeri 5 Surabaya/4 Januari 2020)
[89] (D/sman5surabaya.sch.id/Visi misi dan tujuan SMA Negeri 5 Surabaya /4 Januari 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Mengembangkan potensi diri peserta didik menjadi manusia tangguh menghadapi persaingan global mengembangkan karakter peserta didik melalui pembelajaran yang berbasis kearifan lingkungan.

Sedangkan untuk tujuan SMA Negeri 5 Surabaya adalah sebagai berikut[90]:

1) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.
2) Mewujudkan kearifan keberagaman agama, bangsa suku, ras dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global.
3) Mengembangkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.
4) Meningkatkan manajemen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran.
5) Meningkatkan mutu lulusan.
6) Memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana pengembangan pendidikan.
7) Meningkatkan potensi peserta didik dalam mengembangkan komunikasi sosial melalui kemitraan yang berskala nasional hingga internasional.
8) Mengembangkan bakat, minat siswa baik di bidang seni, budaya, dan olahraga.

[90] (D/sman5surabaya.sch.id/Visi misi dan tujuan SMA Negeri 5 Surabaya /4 Januari 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Meningkatkan peran serta peserta didik diberbagai lomba di bidang intrakurikuler dan ekstrakurikuler, baik tingkat nasional maupun internasional.

10) Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.

2. Jalur Pendaftaran Calon Siswa Baru

SMA Negeri 5 adalah bagian kecil dari penerapan sistem yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat. Aturan pusat yang berasarkan kebijakan menteri, kemudian turun dan diperinci kembali pada aturan daerah melalui gubernur Jawa Timur.

Aturan yang ada diperinci kembali oleh pemerintah daerah menyesuaikan dengan kesepakatan wilayah dan kondisi yang sedang berjalan. Baik dari segi waktu pelaksanaannya, ketentuan teknis dan lain sebagainya.

Tabel 4. 1 Berikut jadwal pelaksanaan sistem zonasi pada PPDB 2019[91]

No	Kegiatan	Tanggal	Jam	Keterangan
1	Pengambilan PIN/ tes kesehatan	27 Mei-20 Juni 2019	Jam kerja	SMA/SMK Negeri
2	PPDB jalur prestasi, orang tua pindah, inklusi, tidak mampu			
	Pendaftaran	11-13 Juni 2019	08.00-14.00	SMA/SMK Negeri

[91] (D/SMA Negeri 5 Surabaya/PPDB 2019/30 Januari 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Verifikasi dan validasi	14-15 Juni 2019	-	Panitia SMA/SMK Negeri
	Pengumuman	17Juni 2019	08.00	SMA/SMK Negeri
	Pendaftaran ulang	17-18 Juni 2019	08.00-15.00	SMA/SMK Negeri
3	PPDB jalur Zonasi			
	Latihan	27Mei-8 Juni 2019	24 jam	Internet
	Pendaftaran	17-20 Juni 2019	24 jam	Internet
	Penutupan Pendaftaran	21 Juni 2019	24 jam	Internet
	Pengumuman	21 Juni 2019	00.00 WIB	Internet
	Daftar Ulang	21-22 Juni 2019	01.00 WIB	SMA/SMK Negeri

Sekolah yang telah dibuka pada 1 Agustus 1957 ini menerapkan 2 cara dalam penerimaan siswa baru berdaskan Peraturan Gubernur no 23 ahun 2019, yakni dapat dilihat dari tabel berikut bserta jumlah siswa yang mendaftar:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4. 2 Pendaftar di SMA Negeri 5 Surabaya tahun 2019[92]

No	Jalur yang Digunakan		Jumlah yang Mendaftar	Jumlah
1	Online (dalam jaringan	Pilihan I	493 Siswa	614 Siswa
		Pilihan II	121 Siswa	
2	Offline (luar jaringan)	Prestasi non akademik	26 Siswa	122 Siswa
		Anak kurang mampu	20 Siswa	
		Prestasi dari UN	72 Siswa	
		Orang tua mutasi	4 Siswa	
			Total pendaftar	736 Siswa

B. Penyajian Data inti

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti memperoleh data berkaitan dengan implementasi sistem zonasi dalam pemerataan layanan pendidikan di SMA Negeri 5 Surabaya sebagai berikut:

Berdasarkan keputusan dinas cabang pendidikan pembagian wilayah zona sebagai berikut:

[92] (D/SMA Negeri 5 Surabaya/PPDB 2019/30 Januari 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4. 3 Daftar Kecamatan Berdasarkan Akses Zona[93]

No	Pembagian zona	Kecamatan
1	Zona 1	Asemrowo, Benowo, Bubutan, Bulak, Dukuh Pakis, Genteng, Gubeng, Kenjeran, Krembangan, Mulyorejo, Pabean, Cantian, Pakal, Sambi Kerep, Sawahan, Semampir, Simpkerto, Sukolilo, Sukomanunggal, Tambasari, Tandes, Tegal Sari, Wonokromo.
2	Zona 2	Lakarsantri, Taman, Waru, Dukuh Pakis, Gayungan, Gubeng, Gunung Anyar, Jambangan, Karang Pilang, Mulyorejo Rungkut, Sambi Kerep, Sukolilo, Sukomanunggal, Tandes, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, Wonokromo.

Zona di SMA Negeri di Surabaya dibagi menjadi 2 yakni zona satu dan dua. Berikut daftar sekolah mengengah atas negeri beserta alamatnya:

Tabel 4. 4 Alamat Sekolah Menengah Atas Negeri di Surabaya[94]

No	Nama Sekolah	Almat	Wilayah Zona
1	SMA Negeri 1 Surabaya	Jl. Wijaya Kusuma No 48 Ketabang, Genteng.	Zona 1

[93] (D/Tribunnew/Daftar kecamatan berdasarkan akses zona SMA Negeri /30 Januari 2020)
[94] (D/Almatjalan.com/daftar alamat SMA Negeri Surabaya/28 Januari 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2	SMA Negeri 2 Surabaya	Jl. Wijaya Kusuma No 48 Ketabang, Genteng.	Zona 1
3	SMA Negeri 3 Surabaya	Jl. Memet Sastrowiryo Komplek TNI-AL Kenjeran, Bulak.	Zona 1
4	SMA Negeri 4 Surabaya	Jl. Prof. Dr. Mustopo No.4, Pacar Keling, Tambaksari.	Zona 1
5	SMA Negeri 5 Surabaya	Jl. Kusuma Bangsa No.21, Ketabang, Genteng.	Zona 1
6	SMA Negeri 6 Surabaya	Jl. Gubernur Suryo No.11, Embong Kaliasin, Genteng.	Zona 1
7	SMA Negeri 7 Surabaya	Jl. Ngaglik No.27-29, Kapasari, Genteng.	Zona 1
8	SMA Negeri 8 Surabaya	Jl. Sultan Iskandar Muda No.42, Ujung, Semampir.	Zona 1
9	SMA Negeri 9 Surabaya	Jl. Wijaya Kusuma No.48, Ketabang, Genteng.	Zona 1
10	SMA Negeri 10 Surabaya	Jl. Jemursari I No.28, Jemur Wonosari, Wonocolo.	Zona 2
11	SMA Negeri 11 Surabaya	Perumnas Tandes I, Jl Manukan Tengah, Manukan Kulon, Tandes.	Zona 1
12	SMA Negeri 12 Surabaya	Jl. Sememi Kidul No.1, Sememi, Benowo.	Zona 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13	SMA Negeri 13 Surabaya	Jl. Menganti Lidah Kulon, Lidah Kulon, Lakarsantri.	Zona 2
14	SMA Negeri 14 Surabaya	Jalan Perum YKP IV Tenggilis Mejoyo Blok KK, Kali Rungkut, Rungkut.	Zona 2
15	SMA Negeri 15 Surabaya	Jl. Dukuh Menanggal Sel. No.103, Dukuh Menanggal, Gayungan.	Zona 2
16	SMA Negeri 16 Surabaya	Jl. Raya Prapen No.59, Panjang Jiwo, Tenggilis Mejoyo.	Zona 2
17	SMA Negeri 17 Surabaya	Jl. Rungkut Asri Tengah, Rungkut Kidul.	Zona 2
18	SMA Negeri 18 Surabaya	Jl. Bibis Karah Sawah No.9, Karah, Jambangan.	Zona 2
19	SMA Negeri 19 Surabaya	Jalan Kedung Cowek No.390, Tanah Kali Kedinding, Kenjeran.	Zona 1
20	SMA Negeri 20 Surabaya	Jl. Medokan Semampir Indah No.119, Medokan Semampir, Sukolilo.	Zona 2
21	SMA Negeri 21 Surabaya	Jl. Argopuro No.11-15, Sawahan, Kec. Sawahan.	Zona 2
22	SMA Negeri 22 Surabaya	Jl. Balas Klumprik No.22, Balas Klumprik, Wiyung.	Zona 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan tabel yang telah ada, dan aturan yang telah ditetapkan, SMA Negeri 5 surabaya yang berstatus SMA negeri maka wajib menerapkan peraturan yang telah ditepkan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan yang diperjelas oleh Dinas Provinsi Jawa Timur mengenai sistem zonasi pada zona satu. Zona satu dapat diakses oleh siswa yang berdomisili di kecamatan Asemrowo, Benowo, Bubutan, Bulak, Dukuh Pakis, Genteng, Gubeng, Kenjeran, Krembangan, Mulyorejo, Pabean, Cantian, Pakal, Sambi Kerep, Sawahan, Semampir, Simpkerto, Sukolilo, Sukomanunggal, Tambasari, Tandes, Tegal Sari, Wonokromo.

1. Regulasi Sistem Zonasi di SMA Negeri 5 Surabaya
   a. Makna Sistem Zonasi

      Zonasi adalah jalur penerimaan siswa baru dengan memprioritaskan jarak domisili dengan sekolah yang dituju dan waktu pendaftaran.[95] Peraturan sistem zonasi muncul dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 17 tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru dari jenjang taman kanak, sekolah dasar, sekolah mengeah pertama, dan sekolah menengah atas atau kejuruan. Hal ini disampaikan pula oleh dewan pendidikan Jawa Timur.

      ”Sebetulnya zonasi sudah berjalan dalam kurun waktu 3 tahun trakhir ini.”[96]

[95] (D/SMA Negeri 5 Surabaya/PPDB 2019/30 Januari 2020)
[96] (W/Dwi Astutik/bendahara Umum Dewan Pendidikan/2/23 Januari 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebijakan sistem zonasi yang diatur kembali sesuai peraturan daerah, diterapkan pada sekolah menengah atas bukan kejuruan. Peraturan ini mengatur banyak siswa yang bisa sekolah terima sesuai kuota yang telah ditentukan. Berikut daftar jalur penerimaan yang diatur dalam Peraturan Gubernur dalam petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan PPDB Jenjang SMA dan SMK Negeri Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2019/2020 no 188.4/ 3112 /101.7.1/KPTS/2019. berikut presentsimya.

Tabel 4. 5. Presentasi Kuota Penerimaan Siswa Baru SMA Negeri Tahun 2019[97]

No	Jalur Utama	Pembagian	Presentasi
1	Jalur prestasi (5%)	Lomba Akademik atau non akademik	3%
		Prestasi nilai Ujian Nasional	2%
2	Orang tua pindah tugas (5%)	-	(5%)
3	Zonasi (90%)	Jarak rumah dengan sekolah	50%
		Prestasi akademik	20%
		anak dari keluarga tidak mampu, pantiasuhan, anak buruh	20 %
		Total	100%

[97] (D/Juknis PPDB 2019/presentasi kuota penerimaan siswa baru /14 Januari 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai sekolah negeri, SMA Negeri 5 merasa wajib melaksanakan kebijakan tersebut.

> "Ini adalah sekolah negeri, maka mau tidak mau harus melaksanakan kebijakan yang tela ditetapkan oleh atasan. Kita laksakan."[98]

Peraturan ini berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelengaraan pendidikan yang kemudian diperjelas pada aturan menteri pendidikan no 51 tahun 2018.[99] Selaku pusat informasi sekolah, wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat menyatakan bahwa sistem zonasi berjalan di SMA dengan baik. Menurutnya sistem zonasi ini memberikan akses tanpa pandang bulu baik siswa yang pintar mau pun tidak, semua harus diperlakukan baik.

> "Layanan untuk sekolah kepada masyarakat supaya pendidikan merata. Pada hakikatnya pendidikan memberikan layanan pada semuanya tidak pandang bulu apakah dia pandai atau tidak, bagus atau tidak yang pentingkan pemerataan dan zonasi itukan dibuat supaya pendidikan berbasis dengan akses kemudahan akses sehingga masyarakat di sekitar sekolah bisa merata memperoleh pendidikan karena akses untuk dapat diterima."[100]

Calon peserta didik baru yang mendaftar di SMA Negeri 5 Surabaya sebanyak 736 siswa. Seluruhnya terdiri dari berbagai jalur pendaftaran. Baik dari dalam jaringan jalur zonasi pilihan satu dan dua, dan melalui luar jaringan dari jalur prestasi akademik non akademik, anak kurang mampu, prestasi UN dan orang tua pindah tugas.[101] Kuota yang dimiliki

---

[98] (W/ Bambang Eko Purnomo/Waka Humas /03.1/ 9 Januari 2020)
[99] (D/SMA Negeri 5 Surabaya/Petunjuk pelaksanaan teknis PPDB Tahun 2019 SMA, SMK, dan SLB Negeri/30 Januari 2020)
[100] (W/ Bambang Eko Purnomo/Waka Humas /03.1/ 9 Januari 2020)
[101] (D/SMA Negeri 5 Surabaya/PPDB 2019/30 Januari 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh SMA Negeri 5 Surabaya adalah 315 pagu dari 736 pendaftar. Berikut uraian siswa yang diterima oleh SMA Negeri 5 Surabaya.

Tabel 4. 6 Siswa yang diterima SMA Negeri 5 Surabaya[102]

Jalur penerimaan	Jumlah yang diterima	presentasi
Zonasi berdasarkan jarak	158 siswa	50%
Zonasi berdasarkan nilai UN	106 siswa	33%
Selain zonasi	51 siswa	17%
Total	315 siswa	100%

Hal yang sama disampaikan oleh dewan pendidikan, bahwa adanya zonasi dapat memberikan akses pada siswa ketentuan tertentu. Hal ini dirasakan oleh siswa yang rumahnya berada dekat dengan sekolah. Dengan sistem zonasi dapat memudahkan dalam keseharian terutama pada jam berangkat dan pulang sekolah. Dengan dekatnya jarak cenderung jalanan tidak macet dijam-jam tertentu.

> "Sistem zonasi Kemarin itu semangatnya zonasi luar biasa untuk pemerataan pendidikan, sehingga anak bisa tercover, untuk anak ekonomi kelas bawah, jarah rumah tidak jauh."[103]

Tujuan zonasi adalah melayani, memberi akses luas terhadap siswa yang berdomisili dekat dengan sekolah berdasarkan Kartu Keluarga selambat-lambatnya perubahan 6 bulan sebelum pelaksanaan sistem

[102] (D/SMA Negeri 5 Surabaya/PPDB 2019/30 Januari 2020)

[103] (W/Dwi Astutik/bendahara Umum Dewan Pendidikan/2/23 Januari 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zonasi. Peraturan ini diperuntukan pada sekolah yang dibawah naungan langsung pemerintah.

b. Proses Berlangsungnya Sistem Zonasi

Sistem zonasi berjalan pada proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Pelaksanaanya mulai pada tanggal 27 Mei 2019 hingga pada 20 Juni 2019. Pelaksanaan Penerimaan peserta didik baru dengan berkoordinasi dengan pihak dinas pendidikan dan sesama guru yang terbentuk dalam kepanitiaan.

Sistem berjalan tidak lepas dari koordinasi dari berbagai pihak. Begitu pula dengan SMA Negeri 5 yang melakukan upaya koordinasi dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan sistem peerimaan siswa baru. Koordinasi dilakukan pada pihak Dinas Pendidikan Jawa Timur dan sesama panitia. Berikut penjelasan yang disampaikan oleh sekertaris panitia pelaksanaan PPDB:

> "Koordinasi dari pihak dinas ke sekolah langsung pada kepala sekolah, jadi komunikasi dinas melalui kepala sekolah baru kepada panitia pelaksana. Karena apapun yang terjadi otoritasnya tetap pada kepala sekolah. Kalo kami, saya mungkin atau pak Imron sebagai ketua kan pelaksana di sekolah. Komunikasi dari dinas lebih kepada kepala sekolah."

Koordinasi yang dilakukan antar panitia juga dilakukan. Bentuk koordinasi anatar panitia adalah dengan pembentukan panita. Pembentukan pantia ini selalu berbeda tiap tahunnya, panitia PPDB akan selalu diambil dari bagian wakil kepala sekolah bidang kesiswaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut penjelasannya oleh wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat.

> "Ya jadi sama setiap tahunnya dibentuk oleh kepala sekolah, setiap tahun ada panitianya. Ketua nya wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Gitu, jadi siapapun orangnya selalu diambil dari bidang kesiswaan. Dibantu dengan pembina osis dan bapak ibu guru yang lain."[104]

Pembentukan kepanitiaan yang dibentuk oleh kepala sekolah juga dipertegas oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan selaku ketua pelaksana. Berikut hasil wawancaranya.

> "Panitia yang membentuk kepala sekolah, jumlah dari panitiannya ada banyak, ada kurang lebih 20an orang."[105]

Setelah terbentuknya susunan kepanitiaan, seluruh anggota akan melakukan agenda rapat, membuat grup di media sosial guna memudahkan dalam berkomunikasi. Kepanitiaan juga menetapkan pembagian tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Berikut pengungkapan dari sekertaris panitia PPDB 2019.

> "Di sekolah Kami itu yang jelas ada rapat dulu rapat awal, koordinasi pembagaian tugas, dan membuat grup komunikasi (whatsApp). Jadi di kami ini ada grupnya. Sehingga jika ada pemberitahuan bisa disampaikan. Misalnya seperti saat jaga piket hari sabtu untuk pelayanan masyarakat yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya."[106]

Koordinasi yang dilakukan oleh pihak dinas pendidikan dilakukan mulai pengarahan sebelum pelaksanaan penerimaan siswa baru hingga

[104] W/ Bambang Eko Purnomo/Waka Humas /03.1/ 9 Januari 2020)
[105] (W/Mokhamad Imron/ketua panitia pelaksana PPDB SMAN 5 SBY/03.2/13 Januari 2020)
[106] (W/ Yuliana Minarti/Sekertaris Panitia PPDB SMAN 5 SBY/3.4 /30 Januari 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerimaan. Berikut penjelasan mengenai koordinasi yang dilakukan oleh pihak sekolah pada dinas pendidikan.

> "Sekolah melaporkan kondisinya tentang penerimaan itu, jadi yang diterima, di print kemudian ditanda tangani oleh dinas pendidikan untuk pengesahan data yang yang telah diterima. Kalo setelah daftar ulang melaporakan kembali berapa yang daftar ulang berapa yang tidak daftar ualng. Itu koordinasinya kita."[107]

Bentuk koordinasi antara dinas pendidikan wilayah Jawa Timur dengan sekolah selain yang telah disebutkan, ada penamahan jam kerja tambahan dalam memberikan layanan. Dinas memberikan tambahan jam pelayanan pengambilan PIN yang digunakan untuk mendaftar melalui dalam jaringan atau *online*. Hal ini dikarenakan tingginya animo masyarakat dalam pengambilan PIN yang dilaksanakan di seluruh SMA dan SMK Negeri. kebijakan ini berupa hari piket bergantian untuk sekolah melayani pada hari sabtu yang sebenarnya bukan jam kerja. Berikut pemaparan dari Ibu Yuli selaku sekertaris panitia pelaksana PPDB 2019.

> "Hari Sabtu dan Minggu sekolah harus ada yang piket. Jadwal digilir sebanyak SMA Negeri yang ada di Surabaya. SMA 5 jaganya kapan, dan sebagainya. Padahal kalo berdasarkan junis awal itukan pelayanan hanya jam kerja, tapi Sabtu Minggu diminta untuk sekolah ada yang piket. Lebih ke ini mbak animo masyarakat, karena biasanya diawal-awal hari-hari pertama pendaftaran pengambilan PIN itu buayak, akhirnya tidak terlayani, akhirnya diberi kebijakan bahwa Sabtu dan Minggu itu ada yang piket. Tapi tidak SMA 5 Sabtu Minggu terus gitu, tidak. Jadi mungkin SMA 5 besoknya SMA 2. Atau SMA kompleks itu Minggu ini SMA 1 dan 2. Nanti Minggu depannya SMA 5 dan SMA 9. Karena untuk menampung animo masyarakat."

[107] (W/ Yuliana Minarti/Sekertaris Panitia PPDB SMAN 5 SBY/3.4 /30 Januari 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Serangkaian kegiatannya pelaksanaan sistem zonasi yang terdapat pada pelaksanaan PPDB adalah pengambilan PIN, pendaftaran baik jalur *online* (dalam jaringan), *offline* (luar jaringan), seleksi, pengumuman hingga daftar ulang.. Berikut pemaparan Yuliana Minarti.

> "Kalo untuk tahun 2019 dimulai bulan Mei. Kalo ndak salah mulai tanggal 27 Mei mulai pengambilan Pin sampai tanggal Juni tanggal 17 atau 20 Juni, bahkan sebenarnya satu bulan waktunya. Untuk pengambilan pin sebenarnya tidak ada efeknya tapi untuk pendaftaran ada efeknya."[108]

Yuliana Minarti selaku sekertaris panitia menyatakan bahwa proses pertama dalan pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB adalah pengambilan PIN. Kegiatan ini dapat dilakkan pada 27 Meli hingga 20 Juni. Pengambilan PIN ini dilakukan dengan regristrasi data siswa yang kemudian digunakan untuk melakukan perdaftaran.

Kegiatan pelayanan sekolah kepada masyarakat dalam hal ini memberi informasi mengenai penerimaan siswa baru, informasi mengenai program sekolah, dan menyediakan sarana prasarana untuk masyarkat. berikut penjelasan dari hasil wawancaranya:

> "Kami menyediakan tempat sama peralatan. pertama ada jadwal pengambilan PIN yang dilakukan di semua sekolah, maka kami kan juga harus menerima itu. Pengambilan pin itu kan datanya mereka bawa tinggal kita menyesuaikan aja gitu. Yang kedua pada waktu pendaftaran yang kadang mereka tidak yakin dengan mendaftar dirumah yakan, maka ada yang datang kesekolah. Sebenarnya hanya daftar saja. Namun ada hal yang mereka ingin ketahui ada banyak hal yang meraka ingin tanya. Akhirnya mereka orang tua lebih puas

[108] (W/ Yuliana Minarti/Sekertaris Panitia PPDB SMAN 5 SBY/3.4 /30 Januari 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah. Yang ketiga kami menyediakan komputer, jaringan, sama mungkin seperti alat printer dan sebagainya untuk mereka mencetak. Kalo sekolah bentuk informasi yang disediakan berupa papan pengumuman. Kemungkinan kalo ada petunjuk teknis yang perlu diperbesar supaya mereka bisa mengerti. Itu ditempel untuk bahan bacaan beliau beliau nanti jika kurang mengerti baru bertanya."[109]

Pelaksanaan sistem penerimaan calon peserta didik baru dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara *online* atau dalam jaringan dan *offline* atau luar jaringan. Sistem zonasi dilakukan dengan memasukan data siswa terkait identitas dan tempat tinggal calon peserta titik koordinat rumah pada regristrasi PIN di sekolah menengah atas atau kejuruan negeri. disinilah bentuk pelayanan bimbingan dari sekolah pada masyarakat, berikut pemaparan dari sekertaris panitia PPDB 2019.

> "Kalo gini, kalo zonasi yang pakai online itukan sudah ada aplikasinya, jadi orang (calon peserta didik) tinggal daftar online langsung. Itu kalo yang online mengenai presentasi dan sebagainya dan sebagainya itu sudah sistem. Sekolah kasarannya hanya tinggal menemani kalo ada calon peserta didik kurang paham penggunaannya kalo yang online. Kalo yang offline (luar jaringan) tinggal melihat zonanya ya diminta untuk kembali ke zonanya. Dan jika tidak sesuai maka tidak akan bisa diakses melalui sistemnya. Meskipun offline tetap menggunakan sistem."[110]

2. Pemeratan Layanan pendidikan di SMA Negeri 5 Surabaya.

Pelaksanaan layanan pendidikan di SMA Negeri 5 adalah dengan memberikan informasi, bimmbingan, dan sarana prasarana yang dibutuhkan. Pelaknsanaan layanan pendidikan pada proses penerimaan

[109] (W/ Yuliana Minarti/Sekertaris Panitia PPDB SMAN 5 SBY/3.4 /30 Januari 2020)
[110] (W/ Yuliana Minarti/Sekertaris Panitia PPDB SMAN 5 SBY/3.4 /30 Januari 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siswa baru hingga dalam membuat rencana program kegiatan untuk seluruh siswa. Berikut penjelasannya.

Setelah diselenggarakannya penerimaan pesenta didik baru, data yang telah dihimpun diajukan pada cabang dinas pemerintah wilayah provinsi guna disahkan. Setelah penerimaan siswa dari jalur baik zonasi, prestasi, dan orang tua pindah tugas, sekolah mengadakan uji matrikulasi guna pemetaan kemampuan siswa. Hal ini dilakukan guna memberikan layanan pendidikan yang maksimal pada peserta didik yang diterima dari berbagai jalur. Seluruh siswa baru mengikuti kegiatan tersebut dan dapat memilih uji matrikulasi yang diinginkan. Terdapat dua pilihan program yang ada SMA Negeri 5 Surabaya, yakni ilmu pengetahuan alam atau sosial. Berikut penyampaian dari siswa.

> "Ada tesnya mbak, matrikulasi. Tapi matrikulasinya bareng setelah pendaftaran onlinenya sudah selesai. Jadi semuanya bareng-bareng. Pas matrikulasi kalo mau IPS ya tes buat IPS kalo yang mau IPA ya tes buat IPA."[111]

Proses pembelajaran yang diberikan SMA Negeri 5 Surabaya sebagai bentuk layanan pendidikan dalam hal bimbingan belajar dilakukan dikelas berupa kegiatan belajar mengajar (KBM). Dalam KBM di SMA Negeri 5 menggunakan sistem kredit semester, dimana siswa dituntun untuk belajar mandiri.

> "Jadi sekolah itu juga menggunakan Sistem Kredit Semester menggunakan UKBM (unit kegiatan Belajar Mandiri) itu seperti modul jadi disitu itu kita nanti dituntun kalo belajar."[112]

[111] (W/Aisy Ataki/siswa SMAN 5 SBY/3.6/ 27 Jan 2020)
[112] (W/Eva Indrasari/Pengembang SKS/03.3/13 Januari 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Guru mata pelajaran matematika mengafitmasi sistem kredit semester yang dijalankan SMA Negeri 5 Surabaya. Guru akan tetap membimbing siswa dalam proses belajar. kemampuan siswa yang heterogen tidak menyulitkan pendidik, hal ini karena siswa akan belajar kelompok guna menyelesaikan soal yang dihadapi. Apa bila siswa kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut guru akan menerangkan pada kelompok tersebut. berikut penjelasan dari guru matematika.

> "Di sini pakek sistem kredit semester, anak-anak bisa belajar sendiri. Ya mereka diskusi sambil saya keliling kelompok. Ditanyai perkelompok ada yang ndak bisa yang mana, nanti dijelaskan."[113]

Dari keseluruhan penyampaian, data menggambarkan proses implementasi sistem zonasi dalam pemerataan layanan pendidikan di SMA Negeri 5 Surabaya. Pemerataan yang dilakukan dapat ditinjau dari proses penerimaan peserta didik baru, hingga pengelolaan proses pembelajarannya.

Peneliti memperoleh hasil pengamatan layanan pendidikan berupa bimbingan di kelas dengan Sistem Kredit Semester. Berikut gambaran kegiatan dikelas.

> "Pada kelas 10 IPA 7. Proses pembelajaran berjalan pada pukul 06.20 WIB. Sistem pembelajaran yang digunakan di SMA Negeri 5 adalah menggunakan Sistem Kredit Semester, dimana menggunakan lembar kerja siswa UKBM (Unit Kegiatan Belajar Mandiri). Dengan adanya UKBM siswa dituntun untuk dapat belajar lebih mandiri. Guru menerangkan materi yang sedang dipelajari dan kemudian membentuk kelompok.''[114]

[113] (W/ Suharyono/ Guru Matematika SMAN 5 SBY/03.5/9 Januari 2020)
[114] (O/02/01/kelas 10 IPA 7/20 Januari 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4. 1 Foto KBM dengan cara belajar kelompok

Hal yang ditemui pada pekan selanjutnya adalah siswa belajar di kelas cara berkelompok. Berikut gambaran yang peneliti peroleh dari lapangan.

> "Guru membagi kelompok berdasarkan kecepatan belajar. Kelompok ini berfungi untuk diskusi sesuia pencapaian belajar dari UKBM yang ada. UKBM adalah lembar kerja siswa berisikan panduan dan soal terkait dengan tema mata pelajaran yang dibuat oleh guru pengajar di sekolah yang disesuaikan dengan kondisi. Kelompok dalam kelas bersifat dinamis baik dalam tema mata pelajaran atau dengan pelajaran yang lain. Selain berdasarkan kecepatan dalam mengerjakan UKBM siswa nantinya dibentuk kelompok berdasarkan nilai hasil ujian. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan soal yang ada. Guru mengelilingi kelas dan menghampiri kelompok tersebut. Perwakilan dapat mengajukan pertanyaan dan guru dapat menerangkan pada kelompok tersebut. Siswa dapat mengajukan rekomendasi UKBM lanjutan pada guru mata pelajaran jika siswa mampu menyelesaikan UKBM dan ujian sesuai ketentuan dari masing-masing guru. Siswa dapat mempelajari UKMB selanjutnya."

Memberikan pelayanan bimbingan belajar pada siswa dengan sesuai kemampuannya siswa. Cara SMA Negeri 5 dalam mengidentifikasi kemampuan siswa setelah penerimaan peserta didik baru adalah dengan mengadakan uji matrikulasi. Selain itu hasil dari uji ini akan digunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk penentuan peminatan belajar baik ilmu sosial, maupun ilmu alam dan pedoman perencaan program kegiatan selanjutnya. Berikut wawancara dengan siswa kelas sepuluh.

> "Matrikulasinya bareng setelah pendaftaran onlinenya sudah selesai. Jadi semuanya bareng-bareng. Buat penjurusan sama buat nentuin kelas, Cuma nggak diurutin sesuai rank. Jadi diratain gitu kayaknya."[115]

Penyampaian hal yang sama juga dilakukan oleh guru bimbingan konseling. Berikut penjelasnya.

> "Yang jelas itu tadi, kita juga beberapa anak kita tes individu untuk bisa memberikan inputan yang pas ya, karena dari sikotes klasikal itu butuh direferensi melakukan secara individu. di UNAIR, kami rujuk, kita kirim ke sana. Karena memang anak-anak ini disinyalir kapasitas belajarnya memang nggak bisa seperti anak-anak noral lainnya. Jadi mereka harus mendapat perlakukan khusus."[116]

Dari semua pendapat informan diatas merupakan impelentasi pemerataan layanan pendidikan di SMA Negeri 5 Surabaya.

3. Implementasi sistem zonasi dalam pemerataan layanan pendidikan di SMA Negeri 5 Surabaya

Menghadapi pendidikan yang belum merata dengan adanya zonasi cabang dinas pendidikan Jawa Timur yang berlokasi di jalan Jagir menyampaikan sudah ada kiat-kiat yang dilakukan untuk meratakan pendidikan dari segi kompetensi guru, berikut pemaparannya:

> "Peningkatan kemampuan guru dapat dilakukan dengan adanya program MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) seperti guru bahasa inggris yang memiliki tujuan untuk meningkatan pendidikan khususnya di bidang bahasa Inggris di surabaya bisa mengadakan pertemuan. Hal ini perlahan dapat diterapaakan untuk upaya

[115] (W/Aisy Ataki/siswa SMAN 5 SBY/3.6/ 27 Januari 2020)
[116] (W/Eva Indrasari/Pengembang SKS/03.3/13 Januari 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengingkatkan kompetensi guru agar sama antar satu sekolah dengan sekolah lain."[117]

Tiga ratus lima belas Peserta didik baru yang di terima SMA Negeri 5 Surabaya pada tahun 2019 adalah berdasarkan berbagai jalur. 50% diantaranya adalah berasal dari jalur zonasi dengan akses kedekatan jarak rumah ke sekolah. Berikut data jarak rumah siswa yang lulus seleksi dari sistem PPDB Jawa Timur tahun 2019.

Tabel 4. 7 jarak rumah siswa yang diterima SMA Negeri 5 Surabaya pada PPDB 2019.[118]

Kategori	Jarak
Rumah terdekat	264 meter
Rumah terjauh	1639 meter

Banyak siswa dari keseluruhan, diantaranya terdapat 165 siswa berjenis kelamin laki-laki. Dan 150 siswa berjenis kelamin perempuan. Berikut tabel presentasi penerimaan siswa berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4. 8 Tabel penerimaan siswa baru tahun 2019 brdasarkan jenis kelamin[119]

Jenis kelamin	Jumlah
Laki-laki	165

[117] (W/Cahaya Kartika /kepala seksi Kurikulum (SMA dan PKLK/No. 01/3 Januari 2020)
[118] (D/SMA Negeri 5 Surabaya/PPDB 2019/30 Januari 2020)
[119] (D/SMA Negeri 5 Surabaya/BK/30 Januari 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perempuan	150
total	**315**

Serangkaian kegiatan dalam penerimaan siswa baru, baik dari jalur zonasi, prestasi akademik atau non akademik, dan orang tua pindah tugas telah terlaksana. Pada tahun 2019 SMA Negeri 5 menerima siswa dengan hasil nilai ujian yang heterogen. Berikut presentasi penerimaan siswa yang diterima berdasarkan nilai Ujian Nasional.

Tabel 4. 9 Rata-rata nilai Ujian Nasional siswa yang diterima pada PPDB tahun 2019.[120]

No	Rata-rata nilai	Presentasi
1	131-197	2%
2	198-263	8%
3	264-329	10%
4	330-396	80%
Total		100%

Masa transisi dari proses penerimaan siswa yang awalnya berdasrkan nilai danem dan pada tahn 2019 menggunakan jalur tambahan yakni 50% penerimaan siswa yang mengutamakan jarak rumah menuju sekolah membuat input siswa beragam dan heterogen secara nilai ujian

[120] (D/SMA Negeri 5 Surabaya/BK/13 Januari 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasional. Berikut penjelasan dari guru bimbingan konseling selaku tim yangmenganalisis kemampuan siswa:

> "Heterogen ya mbak. Ada yang nilainya 390 dan ada yang130. Adanya belajarnya cepat ada yang rata-rata dan ada yang dibawah dibawah rata-rata. yang ketinggalan itu, kecuali untuk beberapa siswa yang lamban belajar, kami juga ada dari yang nilai unas yang sangat rendah itu, memang masih harus ditingkatkan."[121]

Seluruh siswa yang telah mengikuti uji kemampuan melalui Matrikulias akan dibagi kedalam kelas yang mereka pilih dan sesuai kemampuan siswa. Dalam tiap kelasnya terdiri dari siswa yang heterogen dalam kemampuan. Pendidik atau guru akan senantiasa membimbing jika siswa mengalami kesulitan dalam belajar. berikut hasil pengamatan dalam KBM yang menggunakan sistem pembelajaran berkelompok.

Gambar 4. 2 Foto kegiatan guru menerangkan materi pada salah sau kelompok

Siswa yang mengalami kesusahan dalam belajar dapat mengejar ketertinggalnnya pada materi atau mata pelajaran yang dilakukan di rumah

[121] (W/Eva Indrasari/Pengembang SKS/03.3/13 Januari 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau diluar sekolah. Sekolah memberikan fasilitas sarana dan prasarana dalam hal ini adalah ruang perpustakaan atau kelas.

> "Jadi dia ditarik dari kelasnya itu supaya dia fokus pada pelajaran-pelajaran yang belum dicapai itu dan ketertinggalannya cukup jauh gitu. dia harus ditarik dulu dari kelasnya supaya dia fokus mengerjakan itu ada di perpustakaan, bisa di laboratorium. jika jumlahnya cukup banyak kami jadikan satu kelas khusus."

Berdasarkan pendapat informan diatas merupakan bentuk implementasi sistem zonasi dalam pemerataan layanan pendidikan di SMA Negeri 5 Surabaya.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Sistem Zonasi dalam Pemerataan Layanan Pendidikan di SMA Negeri 5 Surabaya

Implementasi sebuah sistem kebijakan tentunya mengalami hambatan dan pendukung dalam pelaksanaannya. Berikut hasil temuan yang diperoleh peneliti di lapangan:

a. Faktor Pendukung

Adanya peraturan yang telah ditetapkan pemerintah memberikan akses pendidikan. berikut penyampaian dewan pendidikan wilayah Jawa Timur:

> "Dengan adanya undang-undang siswa yang memiliki rumah yang dekat dengan sekolah dapat memperoleh akses untuk masuk SMA Negeri lebih besar. Kedua jumlah presentasi besar tinggi sangat memudahkan mereka untuk masuk."[122]

Hal demikian juga disampaikan oleh wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat. Selain itu beliau juga menambahkan bahwa

[122] (W/Dwi Astutik/bendahara Umum Dewan Pendidikan/2/23 Januari2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendukung terlaksanakannya sistem zonasi dalam pemerataan adalah loyalitas dan kekompakan dari pendidik dan tenaga pendidik. Berikut wawancaranya.

> "Yang pertama memang hal ini adalah program (pemerintah) untuk sekolah, kemudian yang kedua adalah ini kekompakan guru dan karyawan itu nomor satu. Karena jika sekolah sudah kondusif program berjalan. Sebaliknya jika tidak kondusif. Jangankan banyak, sedikit saja ada kalo tidak kondusif ada yang ngerecoki ada yang pro kontra. Tapi kita tidak. Kita sadar memiliki kesadaran loyalitas untuk membawa nama baik sekolah ini. nah ini yang apapun kondisi situasinya, tapi kami berupaya untuk menunjukan bahwa kami mampu jadi yang terbaik."[123]

Staf yang dimiliki SMA Negeri 5 Surabaya menjadi salah satu faktor pendukung berjalannya sistem zonasi dalam pemerataan di SMA Negeri 5 Surabaya.

Sekertaris panitia pelaksana PPDB juga menyampaikan bahwa masing-masing memiliki kemampuannya sendiri sendiri, dal ini yang dapat saling membantu dalam pelaksanan apa yang telah direncanakan. Berikut penjelasannya.

> "Tidak ada kendala di sekolah mengenai Intinya, Iya kami menggunakan tenaga ahli ada operator, beliau juga yang mengurus dapodik, atau hal lain yang berkenaan dengan IT ya ada dari guru IT karena harus mengakses dan menata jaringan, kalo kami ini kan pengguna kalo ga bisa tinggal bilang ke bapaknya."[124]

Faktor pendukung lainnya adalah SMA Negeri 5 Surabaya telah menggunakan sistem kredit semester dua tahun terakhir ini. Dalam

[123] (W/ Bambang Eko Purnomo/Waka Humas /03.1/ 9 Januari 2020)
[124] (W/ Yuliana Minarti/Sekertaris Panitia PPDB SMAN 5 SBY/3.4 /30 Januari 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses pemebelajarannya, siswa dapat belajar sesuai kemampuan belajarnya.

> "Di SMA 5 menerapkan SKS, Ada program itu ini sudah tahun ke dua. jadi anak-anak yang tadi belajar cepat juga kami fasilitasi. Sama kayak anak yang lamban belajar, kita tarik dari kelasnya mereka belajar sendiri."

b. Faktor penghambat

Berikut faktor penghambat sistem zonasi dalam pemerataan layanan pendidikan yang disampaikan oleh pihak dinas pendidikan cabang:

> "Jadi, di Surabaya itu ada 5 kecamatan yang tidak memiliki sekolah, ada suko manunggal, mulyorejo dan yang lainnya. Anak yang berada di Wilayah itu mau (sekolah) kemana? Ga bisakan, akhirnya lari ke Swasta."[125]

Persebaran sekolah yang masih terpusat dan belum merata dinilai belum siap dalam melaksanakan sistem zonasi yang berdasarkan jarak tempuh dari rumah menuju sekolah. Hal ini juga diungkapkan oleh sekertaris panitia PPDB SMA Negeri 5 Surabaya sekalu pelaksana. Berikut penjelasannya.

> "Kalo alasannya pemerataan, Surabaya saja sekolahnya tidak merata, perihal posisi sekolahnya aja ndak merata. Contohnya di timur, Cuma ada SMA Negeri 20 dan 17, sementara wilayahnya ada berapa. Artinya rumahnya yang agak jauh bingung mau sekolah kemana. Akhirnya ke swasta. Kemungkinan anak-anak yang pandai itu ada di jauh-jauh. Maka artinya swata yang hidup. Itu yang perlu difikirkan."[126]

Jarak ukur yang terkadang tidak sesuai dengan kenyataannya dinilai juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan sistem zonasi. Penetapan

[125] (W/Cahaya Kartika /kepala seksi Kurikulum (SMA dan PKLK/No. 01/3 Januari 2020).

[126] (W/ Yuliana Minarti/Sekertaris Panitia PPDB SMAN 5 SBY/3.4 /30 Januari 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

koordinat jarak antara rumah siswa dan sekolah adalah untuk administrasi pembuatan pin. Hal ini disebabkan belum semua alamat rumah terdeteksi oleh aplikasi yang digunakan. Berikut penjelasan yang disampaikan oleh sekertaris panitia PPDB SMA Negeri 5 Surabaya.

> "Cuma kita untuk pengambilan pin, karena pengambilan pin itu kami harus memasukan titik koordinatnya itu yang sering kali mengalami kesulitan. Misalnya kusuma bangsa 21 belum tentu saat di klik di google Map ini udah misalnya 7, lintang sekian. Saat dipindahkan ke webnya PPDB udah geser tapi akhirnya diambil rumah yang terdekat. Dari siswa ke sekolah. Itu yang agak lama, akhirnya diberi kebijakan memperbolehkan tidak tepat. Tapi misalnya gang 2 no 10 yang tapi yang ada nomor 8, sambil siswa ditanya apakah benar ini daerah rumahnya.[127]

Permasalah jarak juga disampaikan oleh dewan pendidikan *wilayah Jawa Timur. Berikut penjelasannya.*

> "Sebenarnya apa tolok ukur yang pas dengan menggunakan google map, sehingga harus ada titik temu titik fokus sehingga tidak menjadi masalah. Jika seorang siswa rumahnya sebenarnya dekat dengan sekolah, tetapi ada sungai maka siswa akan terbaca harus memutari sungai. Sedangkan sebenarnya ada jembatan dalam menghubungkan.[128]

Pandangan yang masih melekat di masyarakat Surabaya adalah jika bersekolah dari sekolah SMP favorit selanjutnya juga di SMA Negeri yang favorit. Berikut pemaparan dari cabang dinas Pendidikan wilayah Sidoarjo.

> "Dan juga pandangan masyarakat masih menginginkan anaknya masuk sekolah yang favorit, contohnya siswa yang dulunya SMP Negeri 1 Surabaya, pasti pinginnya masuk SMAN 5 atau SMAN 2."

[127] (W/ Yuliana Minarti/Sekertaris Panitia PPDB SMAN 5 SBY/3.4 /30 Januari 2020)
[128] (W/Dwi Astutik/bendahara Umum Dewan Pendidikan/2/23 Januari 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal yang sama juga disampaikan oleh dewan pendidikan wilayah Jawa Timur, dimana orang tua berusaha menyekolahkan anaknya disekolah yang favorit. Dan upaya untuk bisa terlaksana adalah dengan nilai Ujian Nasional yang dapat bersaing. Berikut penjelasannya.

> "Lagi pula orang tua telah menyiapkan anaknya untuk mengikuti khursus dan lain sebagainya. Dampaknya, mereka yang telah berusaha maksimal untuk lulus dengan nilai baik berdasarkan UN, tapi dengan sistem zonasi yang ada keterbatasan (kuota penerimaan siswa baru berdasarkan jarak) maka anak-anak ini terkendala. Maka ini menjadi pemikiran yang sangat dalam supaya dilakukan telaah."[129]

Hambatan yang dihadapi lainnya adalah kompentensi pendidik juga dirasa belum sama antar sekolah satu dengan yang lainnya. Hal ini dasampaikan oleh cabang dinas pendidikan bagian kurikulum:

> "Sistem zonasi sebenarnya bagus dari segi tujuannya, hanya saja harus diperhatikan dari segi persebaran sekolahnya dan kemampuan gurunya."[130]

Dengan adanya sistem zonasi berdasarkan jarak dari rumah ke sekolah mengesampingkan nilai Ujian Nasional siswa. Maka sekolah menengah atas negeri menerima siswa heterogen berdasarkan nilainya. Nilai UN di SMA Negeri 5 Surabaya terdiri dari 131 hingga 396. Hal ini dirasa terjadi sebuah disparitas yang tinggi. Berikut wawancara dengan pihak wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat.

> "Karena disparitasnya cukup tinggi dari nilai 39 dengan ada yang 13 kalo dibagi 4 maka rata-ratanya 3. Dengan disparitas yang jauh maka

[129] (W/Dwi Astutik/bendahara Umum Dewan Pendidikan/2/23 Januari 2020)
[130] (W/Cahaya Kartika /kepala seksi Kurikulum (SMA dan PKLK/No. 01/3 Januari 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SMA 5 mengupayakan sumber daya yang ada untuk menentukan strategi"[131]

Dengan kemampuan heterogen siswa yang telah diterima sekolah, maka adanya upaya yang dilakukan sekolah guna memberikan pelayanan merata dann sesuai kepada seluruh siswa. Berikut penyampaiannya.

"Nah ya itu, SMA 5 harus bekerja ekstra keras. Jadi yang pertama dilakukan pemetaan, kemudian dianalisis, kemudian dikelompokan, Perencanaan program kegiatan. Lalu evaluasi."[132]

Hal yang sama juga diungkapkan oleh guru bidang bimbingan konseling yang juga sebagai pengembang sistem kredit semester di SMA Negeri 5 Surabaya.

"Ada yang nilainya 390 dan ada yang130. Adanya belajarnya cepat ada yang rata-rata dan ada yang dibawah dibawah rata-rata. yang ketinggalan itu, kecuali untuk beberapa siswa yang lamban belajar, kami juga ada dari yang nilai unas yang sangat rendah itu, memang masih harus ditingkatkan."[133]

Kemampuan siswa yang heterogen dan yang tergolong rendah dalam kemampuan belajar diyakini memiliki kemampuan dibidang lain. sepertihanya dalam bidang keterampilan seperti menjahit, memasak, otomotif dan lainnya.

"Mestinya, Pemikiran saya pribadi mohon maaf, kalo pengetahuan anak kurang bagus ada kemungkinan ketrampilannya yang bagus. Dan itu benar-benar terbukti juga, artinya seperti ketrampilan seperti menjahit, memasak, merias, itu kan mungkin memiliki kemampuan dibidang lain. Lah ini kan seharusnya yang mengelola adalah SMK."[134]

---

[131] (W/ Bambang Eko Purnomo/Waka Humas /03.1/ 9 Januari 2020)
[132] (W/ Bambang Eko Purnomo/Waka Humas /03.1/ 9 Januari 2020)
[133] (W/Eva Indrasari/Pengembang SKS/03.3/13 Januari 2020)
[134] (W/ Yuliana Minarti/Sekertaris Panitia PPDB SMAN 5 SBY/3.4 /30 Januari 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanya saja SMA Negeri 5 Surabaya belum bisa memaksimalkan hal tersebut karena belum memiliki wadah yang sesuai untuk mereka yang memiliki keterampilan tersebut. berikut hasil wawancara dengan guru yang juga sebagai sekertaris pelaksana PPDB.

> "SMA tidak memiliki ketrampilan banyak, meski ada mata pelajaran kewirausahaan, tapi inikan 1 (satu) dari 16 mata pelajaran. Beda dengan SMK, kalo di SMK ada praktik. Meski SMA 5 memiliki 27 bidang ekstrakulikuler tapi kalo ketrampilan kaitannya untuk memasak, menjahit kami belum punya itu. Lah kalo sekolah lain punya mungkin, kami tidak tahu. Tapi kami tidak memiliki bidang-bidang (menjahit, memasak) itu. Ada mata pelajaran kami PKWU tapi pelajaran ini hanya 2 jam dalam seminggu nah ini butuh waktu panjang, sementara masih ada mata pelajaran yang lain agak kesulitan juga."[135]

Dari semua pendapat informan diatas merupakan penjelasan faktor pendukug dan penghambat yang dapat peneliti sajikan.

C. Pembahasan

Berbagai data yang telah disajikan sebelumnya terkait implementasi sistem zonasi dalam pemerataan layanan pendidikan di SMA Negeri 5 Surabaya. Peneliti akan membahas hasil penelitian dalam skripsi sesuai dengan penyajian data yang meliputi: 1) implementasi sistem zonasi dalam pemerataan layanan pendidikan di SMA Negeri 5 Surabaya. 2)faktor pendukung dan penghambat implementasi sistem zonasi dalam pemerataan layanan pendidikan di SMA Negeri 5 Surabaya. 3) Upaya pengelolaan faktor pendukung dan penghambat

135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem zonasi dalam pemerataan layanan pendidikan di SMA Negeri 5 Surabaya.

1. **Regulasi sistem zonasi di SMA Negeri 5 Surabaya.**

   a. Makna Sistem Zonasi

   Sistem zonasi adalah aturan atau kebijakan jalur penerimaan siswa baru dengan memprioritaskan jarak domisili dengan sekolah yang dituju dan waktu pendaftaran. Peraturan sistem zonasi muncul dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 17 tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru dari jenjang taman kanak, sekolah dasar, sekolah mengeah pertama, dan sekolah menengah atas atau kejuruan. Hal ini disampaikan pula oleh dewan pendidikan Jawa Timur.

   Kebijakan sistem zonasi dapat diartikan sebagai kebijakan, yang mana sebuah aturan dalam segala aspek kehidupan manusai baik dalam lingkup publik maupun privasi.[136]

   Oxford learner's Pocket Dictionary mengidentifikasikan kebijakan sebagai suatu perencanaan dari berbagai tindakanyang telah disetujuiatau dipilih oleh sebuah partai politik, bisnis dan lain-lain.[137] Pendapat ini jika dihubungan dengan sistem zonasi yang telah disepakati oleh pemerintahan dalam undang-undang Peraturan Menteri nomor 51 tahun 2018 dan dalam Peraturan Gubernur no 23 tahun 2019.

[136] Rahayu Kusuma Dewi, *Studi Analisis Kebijakan*, 2016. Hlm 15.
[137] Rahayu Kusuma Dewi, *Studi Analisis Kebijakan*, 2016. Hlm 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai sekolah berstatus negeri yang telah ditetapkan dalam PP &K tanggal 18 Desember 1956 no 6738/B III. SMA Negeri 5 merasa wajib melaksanakan kebijakan sistem zonasi.

Pemerintah melalui lembaga naungannya memiliki tugas pelayanan publik, yaitu memberikan pelayanan kepada umum tanpa membeda-bedakan. Selain itu ada tugas pemberdayaan yakni peran untuk membuat masyarakat menigkatkan kualitas kemanusiaan dan kemasyarakatan.[138] Dalam konteks penelitian ini adalah pada bidang pendidikan.

> "Layanan untuk sekolah kepada masyarakat supaya pendidikan merata. Pada hakikatnya pendidikan memberikan layanan pada semuanya tidak pandang bulu apakah dia pandai atau tidak, bagus atau tidak yang pentingkan pemerataan dan zonasi itukan dibuat supaya pendidikan berbasis dengan akses kemudahan akses sehingga masyarakat di sekitar sekolah bisa merata memperoleh pendidikan karena akses untuk dapat diterima."[139] (Pelayanan paling mendasar pada hakikatnya adalah pelayanan minimum yang meliputi pelayanan pendidikan.)[140]

b. Proses Berlangsungnya Sistem Zonasi

Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan akses layanan pendidikan yang luas adalah dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Sistem zonasi yang muncul pertama kali pada peraturan menteri no tahun 2017 yang telah mengalami perubahan.

Sistem zonasi berjalan pada proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Pelaksanaanya mulai pada tanggal 27 Mei 2019 hingga pada 20 Juni 2019. Pelaksanaan Penerimaan peserta didik baru dengan

---

[138] Rahayu Kusuma Dewi, *Studi Analisis Kebijakan*, 2016. Hlm 42.
[139] (W/ Bambang Eko Purnomo/Waka Humas /03.1/ 9 Januari 2020)
[140] Rahayu Kusuma Dewi. Studi Analisis Kebijakan. 2016. 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkoordinasi dengan pihak dinas pendidikan dan sesama guru yang terbentuk dalam kepanitiaan. Impelemtasi kebijakan dari sistem zonasi menurut model Top Down Approach ini telah memiliki ketersediaan waktu.[141]

Sebuah kebijakan berjalan tentu berdasarkan penetapan dari pihak yang memiliki kewenangan. Dalam proses penerapannya, sistem zonasi berjalan dikarenakan penetapan dari pemerintah pusat, kemudian turun kepemerintahan daerah dan kedinasan. Dalam hal ini SMA Negeri 5 Surabaya berkoordinasi dengan dinas pendidikan jawa timur karena tingkat SMA kemudian adanya garis intruksi dengan dinas cabang pendidikan wilayah.

> "Koordinasi dari pihak dinas ke sekolah langsung pada kepala sekolah, jadi komunikasi dinas melalui kepala sekolah baru kepada panitia pelaksana. Karena apapun yang terjadi otoritasnya tetap pada kepala sekolah. Kalo kami, saya mungkin atau pak Imron sebagai ketua kan pelaksana di sekolah. Komunikasi dari dinas lebih kepada kepala sekolah."

Menurut Brian W hogwood dan Lewis A Gunn dalam model kebijakan *Top Down Approach* memiliki komponen yakni pihak berwenang yang dapat mengklaim dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.[142]

Bentuk koordinasi antara sekolah dengan Dinas cabang pendidikan adalah intruksi sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan kegiatan PPDB, hingga pada pelaporan kegiatan PPDB yang telah selesai.

---

[141] Rahayu Kusuma Dewi. Studi Analisis Kebijakan. 2016.162.
[142] Rahayu Kusuma Dewi, Studi Analisis Kebijakan. 2016. Hlm.162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Sekolah melaporkan kondisinya tentang penerimaan itu, jadi yang diterima, di print kemudian ditanda tangani oleh dinas pendidikan untuk pengesahan data yang yang telah diterima. Kalo setelah daftar ulang melaporakan kembali berapa yang daftar ulang berapa yang tidak daftar ualng. Itu koordinasinya kita."[143] (implementasi sebuah program memerlukan dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.) [144]

Animo masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaan PPDB mengharuskan dinas cabang pendidikan untuk memberikan instuksi tambahan kepada sekolah menengah atas dan kejuruan.

> "Karena untuk menampung animo masyarakat dan juga kadang masyrakat yang menyampaikan takut habis, padahal sebenarnya pengabilan pin itu tidak akan habis. Tidak tau kenapa di masyarakat itu takut kehabisan." Salah satu sumber yang mendukung kebijakan adalah kondisi lingkungan. hal ini sangat mempengaruhi implementasi kebijakan. lingkungan tesebut mencakup lingkungan sosio kultur serta keterlibatan penerima program. [145]

Bentu intruksi yang dilakukan oleh dinas cabang pedidikan guna mengatasi animo minat masyarakat yang tinggi adalah menginstruksikan sekolah menengah atas atau kejuruan negeri untuk membuka layanan pada hari sabtu dengan cara bergantian tiap satuan pendidikan selama waktu mengambilan PIN dibuka.

> "Hari sabtu dan minggu sekolah harus ada yang piket. Jadwal digilir sebanyak SMA Negeri yang ada di Surabaya. SMA 5 jaganya kapan, dan sebagainya. Padahal kalo berdasarkan junis awal itukan pelayanan hanya jam kerja, tapi sabtu minggu diminta untuk sekolah ada yang piket. Lebih ke ini mbak animo masyarakat, karena biasanya diawal-awal hari-hari pertama pendaftaran pengambilan Pin itu buayak, akhirnya tidak terlayani, akhirnya diberi kebijakan bahwa sabtu dan minggu itu ada yang piket. Tapi tidak SMA 5 sabtu minggu terus gitu, tidak. Jadi mungkin SMA 5 besoknya SMA 2. Atau SMA komple itu minggu ini SMA 1 dan 2. Nanti minggu

[143] (W/ Yuliana Minarti/Sekertaris Panitia PPDB SMAN 5 SBY/3.4 /30 Januari 2020)
[144] Rahayu Kusuma Dewi, Studi Analisis Kebijakan. 2016. Hlm155.
[145] Rahayu Kusuma Dewi, *Strudi Anlisis Kebijakan*. 2016. Hlm 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

depannya SMA 5 dan SMA 9. Karena untuk menampung animo masyarakat."[146]

Tekanan kebijakan sebagai proses adalah merujuk pada keterlibatan politik dalam mengenai suatu masalah yang memerlukan respon kebijakan melalui tahapan formulasi dan implementasi, termasuk perubahan-perubahan yang dilakukan selama perjalanannya.[147]

Koordinasi lainya juga diterapkan oleh SMA Negeri 5 Surabaya, dalam pelaksanaan sistem zonasi dibentuk kepanitiaan penerimaan peserta didik baru dengan intruksi dan keputusan oleh kepala sekolah.

"Setiap tahunnya dibentuk oleh kepala sekolah, setiap tahun ada panitianya. Ketuanya wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Gitu, jadi siapapun orangnya selalu diambil dari bidang kesiswaan. Dibantu dengan pembina osis dan bapak ibu guru yang lain."[148]

Terbentuknya panitia pelaksana PPDB di SMA Negeri 5 Surabaya menjadikan dasar untuk melakukan kegiatan maksimal dalam melakukan pelayaan kepada masyarakat. Hal ini tercermin dalam persiapan panitia.

"Di sekolah Kami itu yang jelas ada rapat dulu rapat awal, koordinasi pembagaian tugas, dan membuat grup komunikasi (whatsApp). Jadi di kami ini ada grupnya. Sehingga jika ada pemberitahuan bisa disampaikan. Misalnya seperti saat jaga piket hari sabtu untuk pelayanan masyarakat yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya."[149] (implementasi kebijkan akan sempurna jika adanya tugas terperinci serta diurutkan dengan tepat dan terbentunya komunikasi yang sempurna.)[150] pembinaan dalam manajemen pendidikan merupakan strategi dan teknik pelayanan yang bertujuan merekonstruksi seluruh kelemahan yang berdampak buruk pada

[146] (W/ Yuliana Minarti/Sekertaris Panitia PPDB SMAN 5 SBY/3.4 /30 Januari 2020)
[147] Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*. 2014, Hlm 135.
[148] W/ Bambang Eko Purnomo/Waka Humas /03.1/ 9 Januari 2020)
[149] (W/ Yuliana Minarti/Sekertaris Panitia PPDB SMAN 5 SBY/3.4 /30 Januari 2020)
[150] Rahayu Kusuma Dewi, *Studi Analisis Kebijakan*, 2016. Hlm 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kinerja kelembagaan pendidikan dan mempengaruhi keberhasilan dalam optimalisasi pencapaian tujuan pendidikan.[151]

Pelayanan yang diberikan oleh SMA Negeri 5 Surabaya dalam penerimaan siswa baru dilakukan 2 jalur, yakni dalam jaringan (*online*) dan luar jaringan (*offline*). Pendaftaran yang dilakukan untuk jalur zonasi pada tanggal 27 Mei 2019. Sedangkan untuk jalur prestasi, orang tua pindah tugas, inklusi, dan keluarga tidak mampu pada tanggal 11-13 Juni 2019.

Layanan yang diberikan berupa layanan bimbingan dalam penentian pembuatan PIN untuk mendaftar. Layanan lainnya yang dilakukan oleh sekolah adalah layanan informasi mengenai pelaksanaan dan pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat dalam hal ini adalah wali siswa yang mendaftar. SMA Negeri 5 Surabaya menyediakan komputer, printer, dan sarana prasana lainnya guna memudahkan dalam memberi layanan.

layanan pendidikan secara garis bersar dapat dilasifikasikan menjadi 6, yakni layanan administrasi, layanan bimbingan, layanan kesejahteraan, layanan informasi, layanan sarana dan prasarana, dan layanan pengembangan bakat dan minat serta keterampilan.[152]

2. Pemeratan Layanan pendidikan di SMA Negeri 5 Surabaya

Pelaksanaan layanan pendidikan di SMA Negeri 5 adalah dengan memberikan informasi, bimmbingan, dan sarana prasarana yang

[151] Beni Ahmad Saeban dan Koko Komarudin, Filsafat manajemen pendidikan, Bandung: CV Pustaka Setia. 2016. Hlm 133.
[152] Marzuki Mahmud, Manajemen Mutu Perguruan Tinggi, Jakarta: PT RajaRafndo Persada, 2012, hlm 63-65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibutuhkan.[153] Pelaknsanaan layanan pendidikan diberikan dari SMA Negeri 5 Surabaya kepa masyarakat saat pelaksanaan PPDB. Masyarakat dapat mengakses layanan ini dengan mengunjungi sekolah.

Pemerataan layanan pendidikan di SMA Negeri 5 Surabaya juga sampaikan pada siswa. Hal ini berupa bimbingan yang sama, kesempatan dalam memilih jurusan pemograman studi, dan lain sebagainya. Pemerataan yang terjadi adalah upaya dari pemerintah kepada sekolah negeri agar terciptanya sebuah Ketersediaan layanan pendidikan dalam hal ini akses kesempatan bersekolah. Kesetaraan memperoleh layanan pendidikan.[154]

3. Implementasi Sistem Zonasi dalam Pemerataan Layanan Pendidikan di SMA Negeri 5 Surabaya

Upaya pemerataan dengan adanya sistem zonasi adalah pendekatan secara administrasi negara, dimana negara memberikan akses layanan kepada anak usia sekolah menengah atas untuk mengakses sekolah berdasarkan jarak rumah.

> "Sistem zonasi Kemarin itu semangatnya zonasi luar biasa untuk pemerataan pendidikan, sehingga anak bisa tercover, untuk anak ekonomi kelas bawah, jarah rumah tidak jauh."[155]

Pada pemerataan terdapat dua aspek yang harus diperhatikan, yakni persamaan untuk memperoleh pendidikan dengan dapat dapat dinikmati oleh semua penduduk yang berusia sekolah dan keadilan dalam

---

[153] Marzuki Mahmud. *Manajemen Mutu Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Rajagrafndo Persada. 2012. Hlm 63-65.
[154]Aris Nurlailiyah, Analisis Kebijakan Sistem Zonasi terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta, *Realita*, Vol 17 2019. Hlm. 18.
[155] (W/Dwi Astutik/bendahara Umum Dewan Pendidikan/2/23 Januari 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat yaitu pendidikan bisa di akses oleh antar suku, agama dan kelompok secara sama[156].

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, SMA Negeri 5 Surabaya menerapkan kebijakan pemerintah yang berasas pada pemerataan kesempatan akses layanan pendidikan. 50% kuota yang yang diterapkan untuk jalur zonasi adalah bentuk kepatuhan kepada wewenang pemerintah dan memberikan akses siswa, sedangkan 50% lainnya dipergunakan untuk jalur prestasi, keluarga tidak mampu, dan orang tua pindah tugas.

Setalah siswa dinyatakan diterima, sekolah menyusun rencana guna memberikan layanan pendidikan terbaik untuk siswanya. Bentuk kegiatan yang dilakukan sekolah adalah sebuah manajemen pendidikan. dimana sekolah membentuk Tim untuk menyusun perencanaan, kemudian menginformasikan kepada pihak terkait, pelaksanaan program kegiatan, pengorganisasian, hingga melakukan evaluasi dari program kegiatan yang telah dilakukan. Hal ini disampaikan oleh Mulyana A. Nurhadi, yakni manajemen adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerja sama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efesien.[157]

---

[156] Aris Nurlailiyah. Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta. realita Vol. 17 No. 1 Januariuari 2019. Hlm. 14.
[157] Muhamad Mustari, *Manajemen Pendidikan*, Jakarta:PT Grafindo Persada, 2014. Hlm 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bentuk layanan pendidikan yang disampaikan oleh Marzuki Mahmud, diantaranya layanan bimbingan, layanan pengembangan kemampuan, informasi, administrasi, kesejahteraan, sarana prasarana.[158]

Layanan bimbingan yang diberikan oleh SMA Negeri 5 Surabaya kepada siswanya adalah bimbingan belajar saat kegiatan belajar mengajar. Pemetaan kemampuan siswa, untuk siswa yang memiliki kecepatan belajar yang tinggi dapat disalurkan dan hasil akhirnya siswa dapat lulus lebih cepat. Sedangkan untuk siswa yang kemampuan belajarnya rata-rata dapat menempuh pendidikan 3 tahun. sedangkan siswa yang memiliki kecenderungan belajar lambat dapat menempuh pendidikan maksimal 4 tahun dengan adanya SKS tanpa ada istilah tinggal kelas.

Siswa yang terindikasi belajarnya kurang dari siswa yang lainnya juga direkomendasikan oleh sekolah untuk mengikuti sikotes secara individu di Universitas Airlangga Surabaya. Hal ini ditempuh guna memetakan kemampan siswa dan sebagai acuan untuk kegiatan selanjutnya.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Sistem Zonasi dalam Pemerataan Layanan Pendidikan di SMA Negeri 5 Surabaya

Setiap satuan pendidikan dalam menjalankan kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang tentunya mengalami hambatan dan pendukung.

[158] Marzuki Mahmud, Manajemen Mutu Perguruan Tinggi, 2012, hlm 63-65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Faktor pendukung

Berikut penjelasan G shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis adalah Kondisi lingkugan dan hubungan antar organisasi.[159] Selain pendapat yang telah disampaikan G shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli, ada sumber-sumber yang mendukung kebijakan yang efektif adalah sebagai berikut[160]:

1) Staf sumber daya manusia pelaksana kebijakan, adanya SDM yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan. banyaknya tenaga juga tidak otomatis membuat pelaksanaan kebijakan menjadi efektif. Yang dibutuhkan adalah adanya staf yang cukup dan berkompeten yang akan menunjang keberhasilan.
2) Kewenangan dalam sumber daya untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Kewenangan dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan apa yang diamanatkan.
3) Informasi untuk melaksanakan kebijakan, segala keterangan dalam bentuk tulisan, pesan, pedoman, petunjuk dan tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan.
4) Sarana dan prasarana yang tersedia demi terselenggaranya suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung.

[159] Rahayu Kusuma Dewi. Analisis Kebijakan. 2016. Hlm 155.
[160] Rahayu Kusuma Dewi. Analisis Kebijakan. 2016. Hlm157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian yang telah disampaikan berdasarkan teori, SMA Negeri 5 telah memiliki staf yang berkompeten dan satu suara guna berlangsungnya sistem zonasi dan pemerataan layanan pendidikan. informasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah telah diterima dan dilaksanakan dengan baik. Sarana prasarana yang dimiliki SMA Negeri 5 Surabaya sangat menunjang pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB dan pemerataan layanan pendidikan setelah PPDB. Selain itu SMA Negeri 5 Surabaya juga memiliki sarana jaringan komunikasi dengan universitas atau sekolah lanjutan dalam memberikan layanan pendidikan.

b. Faktor penghambat

Sumber-sumber kebijakan dapat berjalan tidak efektif apabila adanya kegagalan komunikasi, adanya staf yang tidak berkompeten dalam lingkaran pelaksanaan kebijakan, dan sarana prasarana yang kurang memadai. Ada pula teori mengenai efektifitas hukum yakni, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktorkebudayaan.[161]

Faktor masyarakat pada hal ini mengenai informasi yang diberikan. Pada penerapan sistem zonasi tahun ini dirasa masyarakat sudah mengetahui, hanya saja belum sepenuhnya menerima adanya sistem zonasi, waktu yang diberikan dalam sosialisasi dirasa kurang kepada

[161] Muhamad Okto Varezi, Efektifitas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 14 Tahun 2018 Tentang Sistem Zonasi. Fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Akses 3 Februari 2020. Hlm 75-76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masuarakat. Pemahaman informasi yang berbeda-beda mengenai sistem zonasi.

Faktor kebudayaan yang masih melekat pada masyarakat dimana sahi berupaya untuk bersekolah di SMA Negeri dengan hasil nilai ujian dinilai masyarakat terlalu mendadak dengan presentasi 90% untuk sistem zonasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian mengenai implementasi sistem zonasi dalam pemerataan layanan pendidikan di SMA Negeri 5 Surabaya, peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi sistem zonasi berdasarkan kebijakan pemerintah pusat yakni berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 17 tahun 2017 yang diamandemen pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 14 tahun 2018, kemudian diamandemen dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 51 taun 2018. Lebih diperinci kembali oleh pemerintah daerah dalam peraturan gubernur no 23 tahun 2019 berupa keputusan petunjuk pelaksanaan dan teknis PPDB.
2. Pemerataan layanan pendidikan yang dilakukan SMA Negeri 5 Surabaya dalam memberikan akses saat pelayanan PPDB hingga pengelolaan layanan kepada siswa yang telah diterima. Dengan adanya sistem zonasi penerimaan siswa menjadi heterogen berdasarkan nilai danem dan kemampuan siswa. Siswa yang mengalami hambatan dalam belajar akan diberikan bimbingan.
3. Proses implementasi sistem zonasi dalam pemerataan layanan pendidikan di SMA Negeri 5 Surabaya berjalan dalam bentuk kesempatan untuk masyarakat dapat mengakses kebutuhan masyarakat dalam pendaftaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bentuk layanan bimbingan, informasi dan sarana prasarana yang dibutuhkan.

Pemerataan tidak terhenti di proses PPDB, SMA Negeri 5 Surabaya menerima siswa dari jalur zonasi dengan presentase 50 % dari keselurahan pagu yang dimiliki dan jarak terjauh dari penerimaan siswa zonasi jarak adalah 1639 meter dan untuk yang terdekat adalah dengan jarak 264 meter.

Pemerataan juga diterapkan dalam proses layanan pendidikan dalam bentuk bimbingan dan peminatan kemampuan. Adanya heterogenitas menggambarkan kemampuan siswa yang beragam. Maka SMA Negeri 5 Surabaya memberikan fasilitas yang sesuia dengan memberikan kelas cepat untuk siswa yang memiliki kecepatan dalam belajar, kelas reguler, dan kesempatan untuk siswa menempuh 1 semester dengan waku 8 bulan. Sistem ini diatur dalam sistem kredit semester yang digunakan SMA Negeri 5 Surabaya sejak tahun pelajaran 2018.

4. Faktor pendukung berjalannya sistem zonasi dalam pemerataan layanan pendidikan adalah, adanya faktor hukum yakni peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, adanya staf yang kompeten dan kompak dalam pelaksanaan kebijakan, adanya sarana rasarana yang menunjang, adanya informasi yang diperoleh baik dari ekternal sekolah dan interal sekolah.

   Faktor hambatan yang dialami oleh pihak sekolah dari segi faktor masyarakat yakni animo masyarakat tinggi dalam pra pelaksanaan PPDB guna mengambil PIN Id untuk mendaftar ke sekolah yang dituju. sehingga mengharuskan pemerintah daerah memberi kebijakan pelayanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang harus dilakukan sekolah pada hari sabtu dan minggu sesuai jadwal piket dari dinas pendidikan provisi.

Siswa yang diterima SMA Negeri 5 Surabaya pada PPDB dengan adanya sistem zonasi ini menjadikan heterogen dalam segi kemampuan. Sekolah memberikan upaya-upaya untuk melayani dengan sebaiknya. Untuk siswa yang memiliki kecepatan belajar yang tinggi dapat belajar dengan waktu 2,5 tahun. siswa yang belajar normal dapat menempuh pendidikan 3 tahun, dan siswa yang tergolong belajar lamban dapat menempuh pendidikan 4 tahun. dalam penyampaian layanan bimbingan SMA Negeri 5 Surabaya memberinya secara merata.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti, agar lebih lanjut mengakaji zonasi dari sudut pandang selain pemetaraan layanan pendidikan.
2. Bagi pemerintah dalam hal ini kementerian pendidikan dan jajarannya selaku tombak pengambilan keputusan dan kebijakan untuk lebih mempertimbangkan langkah dalam mengambil keputusan dengan melihat regulasi yang telah ada dan mendengar aspirasi dari masyarakat.
3. Bagi sekolah dalam hal ini kepala sekolah dan jajarannya agar dapat mempertahankan dan mengotimalkan kebijakan di ranah sekolah guna memberikan layanan pendidikan yang merata pada seluruh siswa baik siswa yang memiliki kemampuan belajar tinggi, sedang, dan lamban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adi Susanto dan Lina Krisnawati. Analisis faktor pendukung implementasi transaksi non tunai dengan pendekatan analitical hierarchy proses (AHP). ExChall - Vol. 1, No. 1, Maret 2019.

Aris Nurlailiyah. Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta. realita Vol. 17 No. 1 Januari 2019.

Beni Ahmad Saeban dan Koko Komarudin, Filsafat manajemen pendidikan, Bandung: CV Pustaka Setia. 2016.

Cecep Wahyu Hoerudin. "Evaluation Of New Student Admission Policy Based On Zonation System In Bandung City" *JISPO* VOL. 9 No. 2 Edisi: Juli-Desember Tahun 2019.

Dien Novita. Faktor-faktor penghambat pengembangan E-Goverment Studi kasus pemerintahan kota palembang, sumatera selatan. EKSPLORA INFORMATIKA Vol. 4, No. 1, September 2014.

Edi Suharto, Pembangunan, Kebijakan Sosial dan pekerjaan sosial: sprektum pemikiran. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan, 1997.

Ellen Landriany. Implementasi kebijakan adiwiyata dalam upaya mewujudkan pendidikan lingkungan hidup di SMA Kota Malang. ISSN: 2337-7623; EISSN: 2337-7615. Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Volume 2, Nomor 1, Januari 2014.

Hadits tirmidzi. No 2571. bab Mencari Ilmu. Aplikasi Kutubu tisa. Diakses pada 2 Desember 2019.

Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan,* Jakarta: Rajawali Pers. 2015

Imam bawani, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam.* Sidoarjo: Khazanah Ilmu Sidoarjo. 2016.

John. W Creswell. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.

Lambertus Pramudya Wardhana, Ki Supriyoko. Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Online Berbasis Zonasi, Prestasi dan Perpindahan. *Media Manajemen Pendidikan*. p-ISSN: 2622-772X e-ISSN: 2622-3694 Volume 2 No. 2 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lexy Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2016.

Lijan Poltak Sinambela dkk, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

Lukman Hakim. Pemerataan Akses Layanan Pendidikan bagi Rakyat Sesuai dengan Amanat Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. ISSN: 2442-6024.*Jurnal EduTech* Vol. 2 No. 1 Maret 2016.

M. Agus Nuryatno. Islamic Education In A Pluralistic Society. *Al- Jami'ah,* Vol. 49, No. 2, 2011 M/1432H.

M. Quraish Shihab. *Tafsir Al Mishab Jus Amma: Pesan dan kesan dan keserasian Al-Quran.* Jakarta: Lentera Hati. 2007.

Marzuki Mahmud. *Manajemen Mutu Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Rajagrafndo Persada. 2012.

Muhammad Ilyas, Tamrin Abdullah. The Effect of Leadership, Organizational Culture, Emotional Intellegence, and Job Satisfaction on Performance. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)* Vol.5, No.2, June 2016, pp. 158~164 ISSN: 2252-8822.

Muhamad Mustari, *Manajemen Pendidikan*, Jakarta:PT Grafindo Persada, 2014

Muhamad Okto Varezi, efektifitas peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 14 tahun 2018 tentang sistem zonasi. Fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Akses 3 Februari 2020.

Mujianto Solichin dan Imama Kutsi. Implementasi Pemendikbud Nomor 14 tahun 2018 tentang penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Sistem Zonasi pada Tingkat Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar di Kecamatan Jombang, Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam, Vol 5 No 1 Juni 2019.

Nanang Fattah. *Analisis Kebijakan Pendidikan.* Bandung: Remaja Rosdakarya. 2014.

Novrian Satria Perdana. Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*. P.ISSN: 25795082. Vol 3. 2019.

Rahayu kusuma dewi. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: Pustaka Setia. 2016

Riant Nugroho. *Public Policy*, Jakarta: Elekmedia Komputindo, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ronawaty Anasiru. Implementasi model-model kebijakan penanggulangan anak jalanan di kota makassar. Doktor bidang Administrasi Publik. Sosiokonsepsia, Vol. 16 No. 02, Tahun 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung: Alfabeta. 2018.

Tachjan. Implementasi Kebijakan publik, cet. 1, Bandung: AIPI. 2006.

Thomas Joni Verawanto Aristo, Analisis Permasalahan Pemerataan Pendidikan di Kabupaten Sintang. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan. Vol 7 No 1 April 2019.*

Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia. Surabaya*: Reality Publisher. 2008.

Yusuf Al- Qaedlawiy. *Sunnah, ilmu pengetahuan dan peradaban*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2001.

Zaini Tamin AR DKK. *Politik pendidikan (konsep dan praktik kebijakan pendidikan di Indonesia).* Sidoarjo: CV. Dwiputra Pustaka Jaya. 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id